

SKRIPSI

**STUDI ANALISIS KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO
PADA ABAD XVI M DI MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**ANDI ASHARI
NIM: 16.1400.043**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**STUDI ANALISIS KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO
PADA ABAD XVI M DI MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Munaqasyah

OLEH:

**ANDI ASHARI
NIM: 16.1400.043**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

20234 M/1445 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada
Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Andi Ashari

NIM : 16.1400.043

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : B-1099/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP : 196412311992031045

Pembimbing Pendamping : Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.

NIP : 196212311992031045

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,


Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045
NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Andi Ashari

Nomor Induk Mahasiswa : 16.1400.043

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : B-1099/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2023

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. A. Nurkidam, M.Hum. (Ketua)

Dr. Hj. Hasnani, M.Hum. (Sekretaris)

Dra. Hj. St. Aminah, M.Pd. (Penguji Utama I)

Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. (Penguji Utama II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban suri teladan kekasih Allah swt. baginda Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulisnya kepada Ibunda Andi Rosmila dan Ayahanda Agus Salim tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Hasnani, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum., sebagai “Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. dan Bapak Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. selaku Dosen Penguju atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Bapak/Ibu Dosen Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selama ini telah mendidik

penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Saudara kandung penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan memotivasi untuk terus menggapai cita-cita dan menjadi kebanggaan keluarga.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Sejarah Peradaban Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal *jariah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca kerkenan memberikan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Januari 2024

Penulis,



Andi Ashari

NIM. 16.1400.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ashari
NIM : 16.1400.043
Tempat/Tgl. Lahir : Mallawa, 27 Oktober 1999
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI
M di Mallusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2024

Penulis,



Andi Ashari
NIM. 16.1400.043

ABSTRAK

Andi Ashari (16.1400.043). *Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Barru* (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Hj. Hasnani).

Peristiwa sejarah berbagai kerajaan-kerajaan masa lalu yang ada di dunia dapat diketahui dengan bantuan para sejarawan. Berbagai kerajaan-kerajaan besar hingga kerajaan kecil dapat diketahui dan dikenal melalui penelitian-penelitian sejarah yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo, dampak suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dan mendeskripsikan analisis suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah (historis). Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui tahapan-tahapan dimulai dari heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

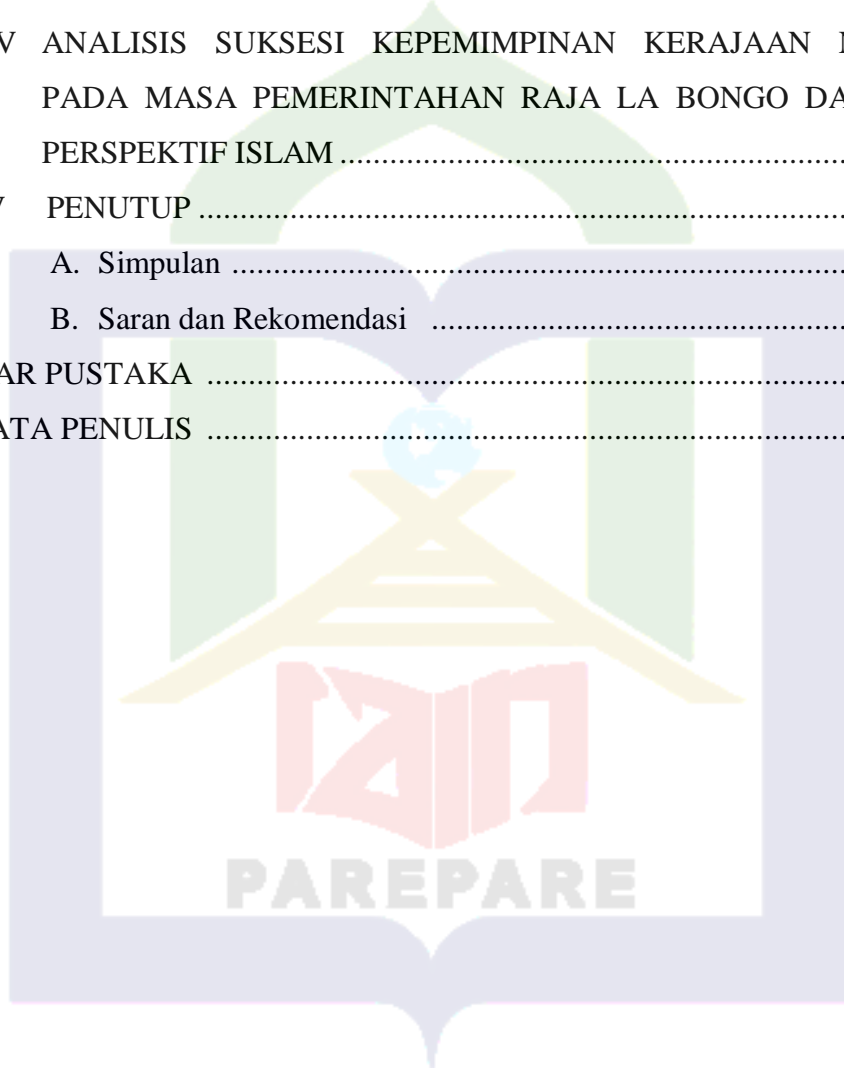
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses suksesi kerajaan-kerajaan di dunia dapat berlangsung secara heredit, beberapa kerajaan menggunakan sistem pemilihan atau konsensus, dan suksesi akibat invasi atau penaklukan kerajaan lain. Suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada masa pemerintahan Raja La Bongo yaitu peralihan kepemimpinan dari *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) dengan kepemimpinan kolektif menjadi kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo*. Hal ini juga menunjukkan pergeseran dari sistem suksesi kepemimpinan berdasarkan keturunan ke sistem suksesi berdasarkan kesepakatan dan pemilihan. Dampak suksesi kepemimpinan memberikan hubungan simbiosis mutualisme antara Kerajaan Suppa' dengan Kerajaan Nepo, terhindar dari perang saudara di antara mereka dan pengaturan pemerintah yang lebih efektif dan menciptakan stabilitas di dalam kerajaan Nepo di bawah pemerintahan La Bongo. Perspektif Islam terkait proses suksesi tersebut memberikan deskripsi kepada pembaca tentang pentingnya syura' atau musyawarah dalam pemilihan seorang pemimpin dengan memperhatikan kriteria-kriteria pemimpin dilihat dari aspek integritas atau akhlak, kemampuan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab karena dalam Islam setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dilakukannya kepada Allah swt. di akhirat kelak.

Kata Kunci: Suksesi, Kepemimpinan, Kerajaan Nepo.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	8
G. Landasan Teori	14
H. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Jenis dan Sumber Data.....	45
4. Teknik Pengumpulan Data	46
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47

BAB II	SUKSESI KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA BONGO	50
BAB III	DAMPAK SUKSESI KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO PADA MASA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA BONGO	60
BAB IV	ANALISIS SUKSESI KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA BONGO DALAM PERSPEKTIF ISLAM	66
BAB V	PENUTUP	76
	A. Simpulan	76
	B. Saran dan Rekomendasi	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	BIODATA PENULIS	89



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Penelitian Relevan atau Terdahulu	9



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	41
3.1	Silsilah Keluarga Arung La Bongo	61
3.2	Peta Kuno Nepo dan Batu Pute	63
3.3	Foto La Colo Arung Nepo/Arung Mallusetasi, Raja Nepo/Mallusetasi yang terakhir	64



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	83
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	84
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	85
4	Dokumentasi	86
5	Riwayat Hidup	89



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَالَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘‘ima*

عُدُوْا *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *‘arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

عَلِيٌّ *‘ali* (bukan *‘alyy* atau *‘aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an),

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī z{ilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kajian sejarah menjadi sangat penting ditengah-tengah pesatnya pertukaran budaya antar bangsa diseluruh dunia yang saling mempengaruhi kondisi kehidupan antar bangsa mulai dari hal yang sangat sederhana hingga permasalahan yang kompleks, dari yang bersifat perorangan, kelompok hingga lebih luas lagi mencakup sebuah bangsa. Para ahli sejarah memberikan sumbangsi besar bagi pembangunan negeri khususnya di Indonesia sebagai wujud kearifan manusia untuk berbagi informasi kepada generasi penerus tentang berbagai peristiwa masa lalu. Upaya tersebut menunjukkan kepada manusia saat ini dan masa depan bahwa sebelum mereka pernah hidup orang-orang terdahulu yang berjasa dan memberikan andil besar bagi pembentukan peradaban kehidupan manusia dan bentuk motivasi dan teladan bagi generasi selanjutnya untuk menata masa depan yang lebih cemerlang.

Peristiwa sejarah berbagai kerajaan-kerajaan masa lalu yang ada di dunia dapat diketahui dengan bantuan para sejarawan. Berbagai kerajaan-kerajaan besar hingga kerajaan kecil dapat diketahui dan dikenal melalui penelitian-penelitian sejarah yang dilakukan. Sejarah kerajaan jug menceritakan tentang kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah-daerah, aktivitas-aktivitas masyarakat terdahulu, ilmu pengetahuan dan pandangan hidup, sistem pemerintahan, agama, politik, teknologi, organisasi sosial, bahasa, kesenian dan perekonomiannya untuk bertahan hidup dan menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan

memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka. Karena itu kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara 2 spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal), sehingga kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal yang mengilhami rekam jejak langkah kehidupan masyarakat setempat di masa lalu. Penulisan sejarah lokal dalam dasawarsa ini mengalami perkembangan penting, baik kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dapat dilihat semakin bermunculan penulisan karya sejarah. Karya-karya itu dapat merupakan sejarah yang bersifat umum dan sejarah lokal.¹

Pengkajian sejarah kerajaan dapat memberikan banyak informasi tentang sistem pemerintahan dan kondisi masyarakat pada masa lalu. Melalui studi dokumen sejarah seperti kronik, surat, catatan perjalanan, dan sumber-sumber lainnya. Sejarah dapat menelusuri bagaimana kerajaan tersebut diatur dan bagaimana kekuasaan dipertahankan. Kajian sejarah kerajaan akan memberikan deskripsi tentang kebiasaan, budaya, dan sosial ekonomi masyarakat pada masa tersebut. Selain itu, pengkajian sejarah kerajaan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan sebuah kerajaan. Searawan dapat mempelajari perang, bencana alam, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada akhir sebuah kerajaan. Dengan demikian, pengkajian sejarah kerajaan secara otomatis dapat memberikan wawasan yang berharga tentang masa lalu, serta membantu kita memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini.

¹Hasanudin, *Sejarah Sosial Politik Kerajaan Banggai (1907-1942)* (Yogyakarta: Kepel Pres, 2015), h. 1.

Kerajaan pada umumnya menjadi pusat kebudayaan dan peradaban. Kerajaan merupakan jenis pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Sultan atau Raja pada suatu wilayah. Sistem kerjaan sebagai sistem tertua di dunia. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan dibantu oleh seperangkat pejabat pemerintahan yang tersusun secara hirarkis dan menduduki bagian birokrasi tertentu pada pemerintahan kesultanan. Umumnya jabatan ini diduduki oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan sultan ataupun kerabat kesultanan.

Salah satu bagian wilayah yang sistem pemerintahannya berada di bawah pimpinan Sultan atau Raja ialah wilayah Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa Tallo, Kesultanan Bone, Kesultanan Soppeng, Kedatuan Suppa, Kerajaan Bantang, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Sawitto serta terdapat pula Kerajaan Nepo. Kerajaan Nepo merupakan salah satu wilayah kerajaan-kerajaan tradisional yang pernah berhasil membangun suatu sistem pemerintahan yang unik. Wilayah kekuasaannya sempat eksis dan diakui oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya di Timur Nusantara.

Keberadaan kerajaan di sebuah tempat menunjukkan bahwa masyarakat di tempat tersebut sudah mengenal sistem pemerintahan dan tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, terlepas dari apakah sistem tersebut masih sederhana ataupun sudah sangat kompleks. Sebagai pusat kebudayaan dan peradaban, kerajaan/kesultanan menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang sangat banyak, baik yang bersifat berwujud (tangible seperti bangunan, cagar budaya dan pakaian adat) maupun tidak berwujud (intangible seperti hukum, etika adat, mitos dan lain-lain).

Kekayaan sejarah dan budaya dari masa ke masa bisa bertambah dan bisa berkurang jika kerajaan tersebut mampu mempertahankan eksistensinya, mampu beradaptasi dengan perubahan tatanan sosial dan tuntutan masyarakat, dan mampu

mengembangkan diri untuk menjawab tantangan zaman, maka sejarah dan budaya yang sangat banyak itu eksis dan berkembang menjadi peradaban yang kokoh dan kuat. Sebaliknya, sejarah dan budaya yang sangat banyak tersebut bisa pula menyusut bahkan hilang jika sebuah kerajaan gagal mempertahankan eksistensinya. Apapun kondisi yang ada, apakah sebuah kerajaan masih eksis atau sudah surut, warisan sejarah dan budaya yang pernah dan masih dimilikinya sangat penting untuk didokumentasikan dan dipublikasikan ke seluruh dunia melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian dalam rangka menggali, mendokumentasikan, mengolah, serta mempublikasikan warisan sejarah dan budaya kerajaan nusantara penting untuk dilakukan. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari pengkajian kerajaan. Pertama, karena sebuah kerajaan akan lebih dikenal secara luas, oleh masyarakat di seluruh pelosok. Kedua, dengan terdaptarnya sebuah kerajaan di pusat data dan informasi kerajaan seluruh dunia, maka anak cucu akan selalu bisa mempelajari warisan leluhur. Meskipun mungkin secara fisik warisan tersebut sudah tidak ada wujudnya. Ketiga, segala sesuatu utamanya nilai-nilai kehidupan yang unggul pada masa lalu, yang tersimpan di dalam sebuah kerajaan selamanya akan terus menerus menjadi sumbangan yang sangat besar bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sejarah dan budaya.

Untuk konsteks pemikiran tersebut, masih perlu dikaji secara mendalam tentang kerajaan-kerajaan lokal yang pernah ada di masa lalu seperti halnya Kerajaan Nepo. Agar memberikan informasi dalam memperluas khazanah pengetahuan sejarah kebudayaan nusantara. Sebab sampai saat ini belum banyak teori-teori yang membahas sistem pemerintahan, keadaan sosial, politi, agama dan lain sebagainya tentang

Kerajaan Nepo. Keberadaannya pun bahkan hampir dilupakan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, Kerajaan Nepo sangat penting untuk diteliti dan disebarluaskan informasinya serta guna bagi kejayaan bangsa Indonesia, masa kini dan masa yang akan datang.

Desa Nepo terletak dititik koordinat 119° 69' 00" BT 04° 03' 00". LS. Nepo sebagai kerajaan Mallusetasi di pesisir barat dapat ditelusuri sejarahnya didalam naskah lontara. Wilayah Kerajaan Nepo kini menjadi bagian dari Kabupaten Barru yang pada masa lalu merupakan sebuah kerajaan yang berotonomi. Secara historis Nepo tumbuh menjadi sebuah kerajaan unifikasi atas sejumlah wanua-wanua. Namun dalam perjalanannya Nepo mengalami dialektika politik dengan kerajaan-kerajaan besar Sulawesi Selatan seperti: Bone, Suppa, Soppeng, Sidenreng, Gowa dan Luwu. Unifikasi wanua-wanua yang membentuk Nepo Raya dan berdirilah sebuah ikatan politik.²

Unifikasi Nepo dalam naskah Lontara disebutkan bahwa munculnya Kerajaan Nepo ditandai dengan diangkatnya pemimpin pertamanya sebagai raja (arung) bernama La Bongo, seorang putra bangsawan dari Kerajaan Suppa. Tradisi tertulis maupun lisan mengisahkan bahwa Nepo dan Kerajaan Tanete disebutkan pernah menjadi kerajaan yang diperhitungkan di wilayah Mallusetasi. Walaupun kebesarannya belum dapat menyetarai kerajaan tetangganya di sebelah utara *Lima Ajatappareng*.³ Andi Nurkidam & Hasmih mengungkapkan pentingnya penelitian sejarah dilakukan sebab pemanfaatan data sejarah baik bentuk peninggalan sejarah maupun arkeologi saat ini

² Akil Dulu, *et al., eds., Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar: Balai Cagar Budaya Makassar, 2013), h. 128.

³ Akil Dulu, *et al., eds., Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar: Balai Cagar Budaya Makassar, 2013), h. 128-129.

terus menerus berkembang dan memiliki fungsi cukup penting dalam kehidupan manusia diantaranya fungsi praktis, fungsi ekonomi dan fungsi rekreatif. Masing-masing fungsi tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam menopang proses keberlangsungan aktivitas manusia dan lingkungan sosialnya. Dengan ilmu sejarah, arkeologi dan lainnya, dilakukan sebagai upaya untuk menyusun sejarah dan kebudayaan; memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya yang didasarkan pada peninggalan fisik; mengetahui tentang manusia dan perkembangan budaya; mempelajari perilaku manusia dan ekologi untuk sejarah dan prasejarah masyarakat.⁴

Berdasarkan dari hasil uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam serta membahas Kerajaan Nepo, dengan Judul Penelitian “Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo?
2. Bagaimana dampak suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo?
3. Bagaimana analisis suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

⁴A. Nurkidan, Hasnani, Hamsiah, et al., eds., *Jejak Arkeologi Islam Luwu* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 8-9.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo.
2. Untuk mendeskripsikan dampak suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo.
3. Untuk mendeskripsikan analisis suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang sejarah Kerajaan Nepo khususnya mengenai suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo.
- b. Untuk menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tentang kurangnya referensi tentang Kerajaan Nepo.
- b. Bagi masyarakat secara umum, memberikan khasanah tentang pentingnya pengetahuan sejarah khususnya Kerajaan Nepo bagi kemajuan suatu daerah dan bangsa berdasarkan sudut pandang Islam.

E. Definisi Istilah Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menjabarkan beberapa definisi istilah untuk mencegah adanya penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Suksesi Kepemimpinan

Suksesi kepemimpinan merupakan proses penggantian kepemimpinan karena pewarisan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan adat istiadat yang berlaku serta disebabkan-sebab lainnya di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Suksesi kepemimpinan dalam hal ini akan membahas suksesi kepemimpinan suatu yang pernah eksis di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo (Arung La Bongo).

2. Kerajaan Nepo

Kerajaan Nepo atau Kerajaan Mallusetasi merupakan salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Berdasarkan naskah lontara, Kerajaan Nepo berada di bagian pesisir barat dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya, kerajaan Nepo merupakan kerajaan mandiri yang terdiri dari sejumlah wanua-wanua yang bersatu dalam satu kerajaan. Seiring perkembangannya, Kerajaan Nepo dipengaruhi oleh Kerajaan Bone, Kerajaan Suppa, Kerajaan Soppeng Riaja, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Luwu.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Setelah melakukan penelusuran dan penelahan terhadap berbagai literature, peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo konsep Islam tentang suksesi kepemimpinan. Beberapa studi sebelumnya kemudian dijadikan sebagai rujukan penelitian sebelumnya yang telah dibahas dan berhubungan dengan penelitian penulis tampilkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan atau Terdahulu

No.	Penulis/Judul Penelitian	Perbedaan	Relevansinya	Simpulan
1.	Susilo Setyo Utomo, Djakarih dan Siti Hajar Abdurachman pada Tahun 2021 dengan Judul "Sejarah Kerajaan Lamahala Pada Masa Pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891".	Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Susilo Setyo Utomo, Djakarih dan Siti Hajar Abdurachman wawancara, studi dokumen dan observasi. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>) biasa disebut dengan riset kepustakaan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, studi pustaka dan dokumentasi.	Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sejarah kerajaan di Indonesia sehingga menggunakan teknik analisis sejarah. Sehingga pendekatan yang digunakan historis, agama, normatif, dan sosiologis.	Sekitar awal abad 15 (sekitar tahun 1520-an), terbentuk dan berdirinya Kerajaan Lamahala dengan struktur suku, adat dan budaya yang diwariskan dari keempat riang tersebut. (2) Sejak Kerajaan Lamahala di pimpin oleh Raja Sewa Sengaji (1884-1891), kehidupan masyarakat di Kerajaan Lamahala masih seperti dahulu yang aman, tentram dan damai. Raja Sewa Sengaji dikenal dengan sosok raja yang Arif dan Bijaksana. Pada masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat dapat dikatakan makmur, saling gotong royong, saling menghargai dan hidup rukun. (3) Hubungan antara Kerajaan Lamahala dengan Kerajaan lainnya yaitu Kerajaan Terong, Kerajaan Lohayong dan Kerajaan Lomblem membentuk satu kerukunan yang disebut dengan Solor Wathan Lemma. Setelah berhasil mengusir Portugis yang dibantu oleh Belanda dari tanah Kepulauan Solor.
2.	Galih Adi Putra dan I Wayan Midhio pada Tahun 2023 dengan Judul Penelitian "Warisan Agung Gajah Mada: Menyingkap Kejeniusan Kepemimpinan dan Kecemerlangan	Penelitian sebelumnya menggali tokoh sejarah Gajah Mada yang menawan, mengeksplorasi kecakapan kepemimpinan dan kecerdasan strategisnya dalam konteks Kerajaan Majapahit. Dengan berfokus pada pemahaman dampak dan warisan kepemimpinannya.	Kedua penelitian ini mensintesis karya-karya ilmiah yang ada, menganalisis sumber-sumber primer, dan menerapkan teori-teori yang relevan untuk mengungkap peristiwa sejarah Kerajaan di masa lalu sama dengan	Temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kepemimpinan dan pemikiran strategis sambil menekankan pentingnya warisan Gajah Mada yang bertahan lama dalam membentuk Kerajaan Majapahit dan perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya.

	Strategi Kerajaan Majapahit	Sedangkan, penulis menggali sejarah suksesi Kepeimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam.	yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian pustaka dengan mencari sumber-sumber tertulis baik dari buku, jurnal, dan catatan sejarah.	
3.	Nurul Afifah pada Tahun 2018 dengan judul “Kepemimpinan Sultan Trenggana di Kerajaan Demak 1521-1546 M Ditinjau dengan Konsep Kepemimpinan Jawa <i>Hasta Brata</i> ”	Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan dua teori kepemimpinan. Sedangkan, penulis menggunakan pendekatan historis, agama, normatif, dan sosiologis. Kemudian, perbedaan penelitian sebelumnya menganalisis kepemimpinan Sultan Trenggana dengan pokok bahasan kepemimpinan berdasarkan konsep kepemimpinan Jawa <i>Hasta Brata</i> . Sedangkan, penulis menggali sejarah suksesi Kepeimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam.	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.	Kesimpulan penelitian Nur Afifah bahwa kebijakan di bidang politik yaitu berupa melawan bangsa Portugis, hukum negara Islam, dan perluasan daerah, bidang militer, bidang keagamaan, dan bidang ekonomi. Kepemimpinan Sultan Trenggana sesuai dengan konsep kepemimpinan Jawa <i>Hasta Brata</i> walaupun ada beberapa tindakan yang menyimpang dari makna yang terkandung pada masing-masing watak alam.

Selanjutnya, untuk lebih jelas, penulis jelaskan, sebagai berikut:

1. Beberapa penelitian terkait, berikut pemaparan review studi terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Susilo Setyo Utomo, Djakarih dan Siti Hajar Abdurachman pada Tahun 2021 dengan judul penelitiannya “Sejarah Kerajaan Lamahala Pada Masa Pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891”. Penelitian ini mengungkap kehidupan masyarakat di Kerajaan Lamahala sebelum masa pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891 dan kehidupan masyarakat di Kerajaan Lamahala pada masa pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891. Penelitian ini

merupakan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang ia lakukan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis sejarah yang dilakukan dengan langkah heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi.⁵ Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Susilo Setyo Utomo, Djakarih dan Siti Hajar Abdurachman lebih fokus pada pengungkapan kehidupan masyarakat di Kerajaan Lamahala sebelum masa pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891 dan kehidupan masyarakat di Kerajaan Lamahala pada masa pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji sejarah tentang suksesi kepemimpinan sebuah kerajaan di masa lalu yaitu Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo berdasarkan pespektif Islam sehingga pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian sejarah yang akan dianalisis secara deskriptif dan dihubungkan dengan kepemimpinan Islam.

2. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Galih Adi Putra dan I Wayan Midhio pada Tahun 2023 dengan judul penelitian “Warisan Agung Gajah Mada: Menyingkap Kejeniusan Kepemimpinan dan Kecemerlangan Strategi Kerajaan Majapahit”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tokoh sejarah Gajah Mada yang menawan, mengeksplorasi kecakapan kepemimpinan dan kecerdasan

⁵Susilo Setyo Utomo, Djakarih dan Siti Hajar Abdurachman, “Sejarah Kerajaan Lamahala Pada Masa Pemerintahan Raja Sewa Sengaji Tahun 1884-1891” *Jurnal Sejarah; Pendidikan FKIP Undana*, 18.2 (2021), h. 30-44.

strategisnya dalam konteks Kerajaan Majapahit dengan fokus pada pemahaman dampak dan warisan kepemimpinan, studi ini menerapkan teori-teori yang relevan untuk mengungkap kualitas dan pencapaian luar biasa Gajah Mada. Dengan menelaah sifat-sifatnya, pendekatan visionernya, dan kemampuannya menyatukan berbagai wilayah, penelitian ini menyoroti pelajaran dan wawasan mendalam yang diperoleh dari gaya kepemimpinannya. Selain itu, dengan mengevaluasi secara kritis pemikiran strategis, kampanye militer, upaya diplomatic, dan kebijakan ekonominya, studi ini mengungkap kisah menarik Gajah Mada dan jejaknya yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Temuan penelitian yang diperoleh berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kepemimpinan dan pemikiran strategis sambil menekankan pentingnya warisan Gajah Mada yang bertahan lama dalam membentuk Kerajaan Majapahit dan perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya.⁶

Adapun penelitian Galih Adi Putra & I Wayan Midhio dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengkaji menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki kepemimpinan Kerajaan di Indonesia menggunakan tinjauan literature, di mana tinjauan komprehensif terhadap karya-karya ilmiah yang ada, catatan sejarah, dan sumber-sumber primer dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan sedangkan penulis menggunakan metode sejarah walaupun keduanya sama-sama menggunakan tinjauan komprehensif terhadap karya-karya ilmiah yang ada dan catatan sejarah. Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan oleh Galih Adi Putra & I Wayan

⁶Galih Adi Putra & I Wayan Midhio, "Warisan Agung Gajah Mada: Menyingkap Kejeniusan Kepemimpinan dan Kecemerlangan Strategi Kerajaan Majapahit." *Jurnal Elektrosista* 10.2 (2023), h. 150-151.

Midhio tentang sejarah Kerajaan Majapahit sedangkan penulis berfokus meneliti tentang Kerajaan Nepo di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan terfokus pada suksesi kepemimpinan pada masa pemerintahan Raja La Bongo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah pada Tahun 2018 dengan judul “Kepemimpinan Sultan Trenggana di Kerajaan Demak 1521-1546 M Ditinjau dengan Konsep Kepemimpinan Jawa *Hasta Brata*”. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kepemimpinan Sultan Trenggana dengan pokok bahasan kepemimpinan Sultan Trenggana berdasarkan konsep kepemimpinan Jawa *Hasta Brata*. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan dua teori kepemimpinan. Teori pertama adalah konsep kepemimpinan Jawa *Hasta Brata*. Penggunaan teori kepemimpinan ini bertujuan untuk menganalisis sisi kepemimpinan Sultan Trenggana di Kerajaan Demak meliputi delapan unsur watak alam. Kemudian teori kedua adalah kepemimpinan berdasarkan otoritas tradisional yang dipelopori oleh Max Webber. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat langkah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.⁷

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sejarah kerajaan di Indonesia dan keduanya menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan-tahapan analisis menggunakan metode analisis heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Setelah diperiksa adapun beberapa perbedaan mendasar dengan

⁷Nurul Afifah, “Kepemimpinan Sultan Trenggana di Kerajaan Demak 1521-1546 M Ditinjau dengan Konsep Kepemimpinan Jawa *Hasta Brata*.” *Skripsi: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), h. 1-15.

penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah yaitu membahas dan menganalisis mengenai kepemimpinan Sultan Trenggana dengan pokok bahasan kepemimpinan Sultan Trenggana berdasarkan konsep kepemimpinan Jawa *Hasta Brata*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji sejarah tentang suksesi kepemimpinan sebuah kerajaan di masa lalu yaitu Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo berdasarkan perspektif Islam sehingga pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian sejarah yang akan dianalisis secara deskriptif dan dihubungkan dengan konsep suksesi kepemimpinan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. dan sejarah suksesi kepemimpinan Islam pada masa lalu.

G. Landasan Teori

1. Suksesi

Suksesi secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggantian terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara karena pewarisan atau proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang mengenal peradaban, membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan ini sering menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri terutama pada proses alih kepemimpinan yang biasa dikenal dengan suksesi kepemimpinan. Titik kritis dalam suksesi kepemimpinan ini di antaranya adalah bagaimana mendapatkan seorang calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 970.

makna bahwa pemimpin itu pelayan.⁹ Suksesi menjadi hal yang mutlak dalam sebuah pemerintahan. Dewasa ini, suksesi hanyalah dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan saja. Padahal dibalik itu, tersirat makna akan kehadiran setitik sinar yang akan membawa pada benderangnya lautan gulita. Langkah dan sikap yang bijak diperlukan dengan tujuan mengkonstruksi organisasi ke arah yang lebih baik. Egoisitas hendaknya dikesampingkan demi kepentingan bersama. Maka, mari kita senantiasa merajut kebersamaan dalam setiap nuansa, terkhusus dalam setiap suksesi sebuah kekuasaan. Kebersamaan dan kedamaian dinantikan oleh setiap masyarakat.¹⁰

Menurut Le Breton-Miller & Steier, L. P., suksesi adalah suatu proses untuk mendapatkan kepemimpinan keluarga yang berkompeten pada seluruh generasi. Dalam proses perencanaan suksesi diperlukan adanya transfer nilai-nilai yang telah tertanam sebagai budaya keluarga dan akan menjadi suatu hal yang efektif untuk persiapan generasi selanjutnya.¹¹ Suksesi dalam sebuah organisasi diungkapkan oleh Schmalzried & Fallon sebagai suatu upaya yang proaktif dapat memastikan bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi akan terus menerus mengidentifikasi, bagaimana posisi akan diisi, dengan direncanakan dan tidak direncanakan terjadi.¹²

Suksesi yang biasa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu

⁹ Ragil Sapto Wibowo, "Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Junayah dan Siyasah: UIN Syarif Hidayatullah, (2011), h. 14.

¹⁰ Ragil Sapto Wibowo, "Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Junayah dan Siyasah: UIN Syarif Hidayatullah, (2011), h. 14.

¹¹ Jonathan Linggo, "Proses Perencanaan Suksesi Pada Perusahaan Peralatan Makan" *AGORA: Jurnal Program Manajemen Bisnis Universitas Kristen Petra* 4.1 (2016), hal. 364.

¹² Jonathan Linggo, "Proses Perencanaan Suksesi Pada Perusahaan Peralatan Makan" *AGORA: Jurnal Program Manajemen Bisnis Universitas Kristen Petra* 4.1 (2016), hal. 364.

hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Secara gamblang, suksesi adalah penggantian kepemimpinan dari suatu negara. Sangat natural hal ini terjadi di dalam sebuah negara, suksesi adalah bentuk dari sebuah dinamika kepemimpinan. Perjalanan sebuah negara yang harus memiliki pemimpin, namun bukan berarti sang pemimpin adalah sosok yang abadi, sebab sesuai dengan sunatullah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Begitu juga dengan kepemimpinan, tidak ada yang harus terus dipertahankan sampai sang pemimpin menemui ajalnya, mungkin itu sebuah pemaksaan, dan pemaksaan adalah hal yang sangat buruk buat siapa saja. Kecuali ditengah-tengah kepemimpinannya terhenti karena kuasa Illahi yaitu kematian dan ini tidak bisa ditolak.

Persepsi sebuah suksesi selalu ditanggapi dengan sebuah kontroversi, hal ini sangatlah wajar sebagai sebuah dinamika kehidupan yang selalu ada dua sisi bertolak belakang. Ada yang menanggapi dengan dukungan dan sudah pasti ada banyak yang menolak terjadinya suksesi ini, rasio nya bisa berat sebelah, tidak seimbang. Sebuah suksesi yang memang benar-benar mendapat dukungan positif, biasanya dikarenakan sang pemimpin sudah menemui ajal dan kondisi negara saat beliau tinggalkan dalam keadaan yang sangat baik.

Tidak semua suksesi berakhir seperti itu, kebanyakan suksesi terjadi dikarenakan ada sebuah sistem yang mengharuskan itu terjadi, seperti periodejangka waktu kepemimpinan. Hal ini yang selalu menjadi sebuah polemik, ada banyak pertentangan untuk suksesi yang sudah mencapai waktunya untukberakhir. Ada yang bisa menerima namun banyak pula yang menolaknya mentah-mentah, biasanya ditunjukkan dengan ekspresi yang berlebihan bahkan sampaikepada tindakan-tindakan

anarkis. Ini yang tidak kita inginkan, siapapun anggotanegara itu harus bisa berapresiasi secara positif pada setiap sebuah suksesi yang terjadi, pertentangan adalah suatu hal yang wajar, namun jangan sampaimenimbulkan hal-hal buruk yang bisa mengarah kepada sebuah provokasi yang mengakibatkan proses suksesi itu terganggu. Maka haruslah bisa menerima suksesi ini dengan lapang dada, meskipun ada semacam intrik-intrik yang melandasi terjadinya suksesi itu. Jika merasa ada sebuah konspirasi yang menjadi penyebab suksesi, terima itu semua dengan “legowo“, apapun komponen-komponen suksesi itu yang diketahui tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu semua dinamika hidup, dinamika negara, dinamika kepemimpinan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi jika pemimpin itu diganti. Setiap individu yang memimpin tentulah sudah cukup layak untuk menduduki kursi jabatan kepemimpinannya.¹³

Jadi, apapun yang akan terjadi pada saat berlangsungnya suksesi kepemimpinan, maka harus diterima apa adanya tanpa harus berbuat anarkis. Proses suksesi kepemimpinan dalam suatu negara merupakan suatu hal yang pasti terjadi yang tidak mungkin dapat dihindari.

2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu tujuan, sebab ia merupakan faktor penggerak dan bertanggung jawab atas segala aktivitas dan fasilitas. Anderson mendefinisikan kepemimpinan sebagai upaya mempengaruhi pemikiran dan tindakan dengan kekuasaan agar orang lain melakukan sesuatu yang diharapkan hingga tercapainya tujuan yang telah di

¹³Ragil Sapto Wibowo, “Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Junayah dan Siyazah: UIN Syarif Hidayatullah, (2011), h. 15-16.

tentukan sebelumnya. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan kecakapan serta menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dia juga diuntut untuk mampu mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan pada perkiraan-perkiraan untuk menampung apa yang terjadi mengenai kelemahan-kelemahan serta mencapai tujuan dengan sasaran dalam waktu yang ditentukan.¹⁴

Kepemimpinan adalah menciptakan pencerahan dalam diri orang lain, yang mana seorang pemimpin memiliki gagasan, memiliki visi, serta dapat menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah Negara, yang menjadi dasar seorang pemimpin adalah individu yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan terhadap suatu ilmu pengetahuan. Kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan lainnya dalam suatu lembaga, serta seni atau teknik untuk membuat orang lain mengikuti dan menaati segala keinginannya. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan, S. Soekanto mengatakan, kepemimpinan dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi sehingga dikatakan sukses atau kegagalan yang dialami sebahagian besar ditentukan oleh kualitas orang-orang yang disertai tugas memimpin organisasi.

Kepemimpinan secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” dengan awalan “me” menjadi “memimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing.¹⁵ Perkataan lain yang disamakan

¹⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 769

dalam artiannya adalah yang mengetahui, mengepalai, memandu dan melatih serta membimbing dalam arti mendidik dan mengajari agar orang lain mampu untuk bekerja secara mandiri. Sedangkan yang mengarahkan dan mengatur segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah perintah dari seorang pemimpin. Sehingga, pemimpin adalah orang yang wajib ditunduki dan dipatuhi perintahnya semasa ia masih menjadi kepala atau ketua dari suatu negara, kerajaan atau lembaga yang dipimpinya.

a. Kepemimpinan dalam Konsep Islam

Pemimpin dalam Islam dikenal dengan istilah imam, amair atau sultan, *ulil amri* atau *walatul amr*. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah.

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹⁶

Secara terminologi kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh mempengaruhi antar peribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pemimpin harus memiliki jiwa keperibadian yang tanggung jawab, baik

¹⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 6.

secara fisik maupun spritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Dilihat dari segi ajaran Islam arti dari kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, menyadarkan, memandu dan menunjukkan jalan yang di ridhoi oleh Allah swt, kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menumpuh kembangkan kemampuan dalam mengerjakan sendiri lingkungan orang-orang yang dipimpin.¹⁷

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebagai wadah atau tempat untuk mendorong terwujudnya kegiatan tolong-menolong antara sesama, saudara seagama yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman umat Islam, karena pemeluk agama Islam yang satu bersaudara dengan yang lain. Meskipun berbeda suku, bangsa, atau keturunannya, kegiatan tolong menolong tersebut dimaksudkan adalah dalam berbuat kebaikan dalam bentuk amal sehingga terwujud agama Islam hakiki.

Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal shaleh, dan batang tubuh tiap-tiap pemimpin yang sehat, dan berkepemimpinan mendapat keridhoan Allah swt. Umat Islam sebagai pemimpin, sebagai penguasa dunia. Kepemimpinan tidak akan terlepas dari tanggung jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan.

Jadi dapatlah disederhanakan bahwa kepemimpinan secara keseluruhan merupakan tindakan menciptakan pencerahan dalam diri orang lain, yang mana seorang pemimpin memiliki gagasan, memiliki visi, serta dapat menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan menjadi dasar seorang pemimpin adalah individu yang mempunyai kemampuan dan pengetahuannya terhadap suatu ilmu pengetahuan, serta kepemimpinan juga disebut sebagai proses-proses

¹⁷ Ahmad Saebeni, *et al., eds., Kepemimpinan* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014), h. 67.

pemberian jalan yang mudah dari pekerjaan-pekerjaan orang terorganisir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu halnya posisi seorang pemimpin dalam kegiatan dakwah, kehadirannya sebagai mengurus dan memimpin seluruh elemen dan aktivitas juga dituntut agar mempunyai karakter-karakter khusus sebagai mana yang diharapkan dalam kepemimpinan Islam.

b. Dasar-Dasar Kepemimpinan dalam Islam

Ada beberapa dasar kepemimpinan dalam Islam yang harus dijadikan landasan berorganisasi, di antaranya ialah:

- 1) Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun akan mempengaruhi terhadap kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana Firman Allah swt. Dalam Al-Quran surah An-Nisa/4:144 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ١٤٤

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)”¹⁸

- 2) Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah/5: 57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan

¹⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h.

bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”.¹⁹

- 3) Pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.

Terjemahnya:

“Apabila diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya”. (H.R. Bukhori Muslim).

- 4) Pemimpin harus bisa diterima (*acceptable*), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

خيار أئمتكم النبي تحبو نهم ويحبو نكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبعو نكم.

Terjemahnya:

“Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu, seburuk-buruk pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka yang membenci kamu, kalau melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (H.R. Muslim).

- 5) Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah sebagai mana

Firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah/5: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Terjemahnya:

¹⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁰

Dari hasil penelaah para pakar yang dirangkum dari Al-Qur’an dan hadits, dikemukakan bahwa ada empat sifat yang harus dipenuhi oleh para nabi, yang pada hakekatnya, yaitu:

- a) As-Shidq, artinya kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya.
- b) Al-Amamah, artinya kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Allah ataupun baik dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak.
- c) Al-Fathanah yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan yang dihadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul seketika sekalipun.
- d) At-Tabligh yaitu penyampai orang yang jujur dan bertanggung jawab, atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan.

3. Pola-Pola Suksesi Kepemimpinan

a. Suksesi Dinastik

Yang dimaksud dengan suksesi dinastik yaitu suksesi kepala negara yang dilakukan dengan sistem penunjukan atau pewarisan. Tegasnya, Kepala Negara itu mendapatkan kedudukannya berdasarkan warisan dari kepala negara yang mendahuluinya.²¹ Jadi di dalam suksesi model ini, ada lembaga negara, yaitu kedudukan kepala negara, yang dapat diwariskan. Adapun tentang siapa-

²⁰ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h.

²¹ Huneryager Heckman, *Kepemimpinan* (Semarang: Dahara Prize, 1992), h. 21-28.

siapa yang berwenang mendapatkan warisan kepala negara ini, maka negara itu sendirilah yang mengaturnya atau bahkan itu menjadi hak prografif sang raja sendiri.

Suksesi politik semacam ini, akan baik dan cenderung tidak menimbulkan kekacauan dan bahkan pemberontakan, apabila mengikuti pola garis keturunan yang teratur, dengan pola-pola yang sudah baku dan diketahui oleh semua anggota kerajaan. Sebagai contoh adalah suksesi pada kerajaan Inggris yang sangat teratur dengan menyiapkan dan menunjuk “putra mahkota” semenjak dini dengan nomor- nomor urut kebangsawan yang jelas. Namun apabila tidak mengikuti garis keturunan yang teratur. Maka potensi konflik yang sangat besar akan muncul pada negara tersebut. Contoh suksesi model ini banyak ditemukan pada kerajaan Islam periode klasik dan pertengahan, dimana raja, ketika akan mendekati kematiannya, segera menunjuk siapapun dari anggota kerajaan yang diinginkannya, yang biasanya adalah dipilih diantara anak-anaknya, semisal dinasti Ghazwani, Turki Ustmani,²² dan lain sebagainya.

Khusus negara kerajaan konstitusional semacam Inggris, ia mempunyai dua macam suksesi; suksesi untuk memilih Kepala Negara dan suksesi untuk memilih Kepala pemerintah.²³ Pada suksesi yang pertama, maka Inggris mengikuti polasuksesi dinastik. Tetapi pada suksesi yang kedua, Inggris menggunakan pola pemilihan, yaitu dengan diadakannya pemilu. Di Inggris terdapat tiga partai politik; partai Konservatif, Buruh dan Liberal.

²² Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 65.

²³ Padmo Wahyono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta, Rajawali: 1984),

Ketua dari partai yang dominan dalam majelis rendah (*house of common*) secara tradisional diangkat oleh Ratu (Raja) untuk menjadi Perdana Menteri, dan bersama kabinetnya menentukan kebijaksanaan politik pemerintah.²⁴ Sistem ini juga terdapat di Jepang. Hanya saja dengan partai yang lebih banyak (multi partai).

b. Pemilu

Suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat, diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa, pada konteks yang lebih luas. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).²⁵

Adapun yang dimaksud dengan sistem pemilihan yaitu sistem pengangkatan kepala negara dimana ia menduduki kedudukannya sebagai kepala negara bukan berdasarkan pewarisan tetapi berdasarkan pemilihan. Siapapun dapat menjadi kepala negara, asalkan mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada negara tersebut, dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan harapan, sistem ini masih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu sistem pemilihan langsung dan tidak langsung.

Sistem pemilihan adalah pemilihan dimana semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, memilih calon kepala negara secara langsung, dan

²⁴ Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia seri Geografi "Eropa"* (Cet. I; Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), h. 98.

²⁵ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.46.

tidak melalui perwakilan. Contoh model ini yaitu Amerika Serikat. Pola suksesi yang digunakan pada negara ini adalah pemilihan langsung calon kepala negara (Presiden) yang sudah dipilih dan disiapkan oleh partai-partai yang ada. Pada suksesi model ini, kepala negara sudah dapat diketahui langsung setelah penghitungan suara selesai.

Adapun pemilihan yang tidak langsung adalah pemilihan kepala negara dimana warga negara yang sudah mempunyai hak pilih memilih wakil-wakil yang dianggap dapat mewakili aspirasinya. Kemudian wakil-wakil inilah, yang dianggap penjelmaan rakyat, yang akan menentukan dan memilih siapa kepala negara yang akan diangkat. Dengan anggapan wakil-wakil rakyat adalah penjelmaan rakyat seluruhnya, maka kepala negara yang dipilih juga dianggap sebagai pilihan rakyat.²⁶ Contoh suksesi model ini yaitu Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu tersebut baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan menurut undang-undang.

Atas dasar itu, maka Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu seperti dinyatakan pada pasal 6A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “pasangan calon

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia* Cet. V; Jakarta: Dian Rakyat, 1983), h. 63.

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.²⁷

c. Kudeta

Ketika memahami sebuah kudeta, ada dua peristiwa yang tampak nyata. *Pertama* orang yang terdepak biasanya orang yang sudah tidak memiliki pendukung, ditinggalkan kekuatan, dan tidak berkuasa melawan. *Kedua* orang yang kemudian mengambil alih kekuasaan, pada umumnya didukung pada kekuatan, loyalitas dan keberuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kudeta hanya bisa dilakukan jika ada sejumlah dukungan dan kekuatan.²⁸ Seperti contohnya pada masa Presiden Soeharto yang dikudeta pada tahun 1998 karna beliau sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa dan tidak berkuasa untuk melawan sejumlah elemen masyarakat di seluruh penjuru Indonesia yang kontra terhadap dirinya dan menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Pada saat itu terjadi krisis moneter, demonstrasi besar-besaran dan banyak terjadi penjarahan atau anarkisme dimana-mana.

d. *People Power*

Yang dimaksud dengan *people power* adalah suksesi yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan keamanan (fisik) untuk menegakkan kekuasaan politik.²⁹ Suksesi politik semacam ini bisa berbentuk revolusi (suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan seluruh rakyat), *coup d'etat* (suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan

²⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Arwan Tuti Artha, *Kudeta Mei '98 Perseteruan Habibie-Prabowo* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), h. 10-11.

²⁹ Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 249.

pemerintah lama untuk menggulingkan dan kemudian menggantikannya) atau *pronunciamiento* (suatu perebutan kekuasaan semacam *coup d'etat*, tetapi dengan menggunakan kekuatan militer).³⁰

Setelah dijelaskan di atas, maka dapat di ketahui bahwa terdapat pola-pola suksesi kepemimpinan yang harus diketahui oleh hal layak umum agar tercapaitujuan suksesi yang diinginkan dalam sebuah sistem pemerintahan.

4. Suksesi Kepemimpinan dalam Islam

a. Ayat Al-Qur'an tentang Suksesi Kepemimpinan

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, di antaranya:

1) Surat Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُۭۙ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۭ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ۝۳۰

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui."³¹

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah swt. memilih khalifah untuk memimpin manusia di bumi. Meskipun para malaikat mengkhawatirkan kemungkinan kerusakan dan kejahatan manusia, Allah tetap memiliki rencana-Nya sendiri dalam memilih khalifah.

2) Surat An-Nisa ayat 59

³⁰ Soehono, *Ilmu Negara* (Jogjakarta: Penerbit Liberty, 2005), h. 207.

³¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³²

Ayat ini menekankan pentingnya taat pada pemimpin yang dipilih oleh umat, yang dalam konteks ini adalah *ulil amri* atau para pemimpin yang dipilih oleh umat muslim. Namun, kepatuhan tersebut harus selalu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan jika terjadi perbedaan pendapat, maka harus kembali pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai panduan utama.

b. Hadis Rasulullah saw. tentang Suksesi Kepemimpinan

Rasulullah saw. bukan hanya pemimpin agama atau kepala suatu komunitas agama, tetapi juga merupakan pemimpin negara dan pemimpin umat. Sebagai pemimpin negara, Rasulullah Saw memimpin seluruh wilayah yang dikuasai oleh umat Islam pada masa itu, yaitu Arab Saudi modern dan sekitarnya. Beliau memerintahkan dan mengatur kegiatan politik, ekonomi, dan militer. Rasulullah saw. memimpin seluruh umat Islam dalam hal agama dan moral. Beliau memberikan pedoman dan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Rasulullah saw. juga memperjuangkan hak-hak umat Islam dan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

³² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006).

Rasulullah saw. juga menjadi contoh teladan dalam kehidupan pribadi, baik dalam sikap, perilaku, maupun keputusan. Beliau menunjukkan keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pergaulan dengan keluarga, teman, dan sahabat, hingga dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan. Sebagai pemimpin negara dan pemimpin umat, Rasulullah saw. memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau memberikan inspirasi bagi para pemimpin di seluruh dunia untuk memimpin dengan kebijaksanaan, integritas, dan kepedulian terhadap rakyatnya.

Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., tidak secara spesifik membahas tentang suksesi kepemimpinan atau pergantian pemimpin. Namun, terdapat beberapa hadis yang memberikan pedoman bagi pemimpin dalam memimpin umat dan menjalankan tugasnya. Salah satu hadis yang relevan dengan kepemimpinan adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda:

Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, pemerintah adalah pemimpin atas masyarakat dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggung jawab atas suami dan yang dipimpinnya. Seorang hamba (sahaya) adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (H.R. Muslim).³³

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang dalam kehidupannya ialah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang

³³Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan* (Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hal. 64.

dipimpinnya. Karena itu seorang kepala keluarga adalah pemimpin di tengah keluarganya, bahkan seorang istri adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya, dan ia pun bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Begitu pula seorang kepala negara adalah pemimpin di tengah masyarakat, dan ia pun bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya.

Hadis lain yang dinukilkan oleh Muhammad Bakhit al-Muti'iy dalam Kitab *Hakikatu al-Islam wa Usul al-Hukmi*, Nabi Muhammad saw., bersabda:

Tidak halal (boleh) bagi seorang muslim berdiam (tinggal) dua malam tanpa memba'iat (mengangkat) seorang pemimpin.³⁴

Pada dasarnya ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin/presiden. Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib, baik dalam situasi aman tentram, maupun dalam keadaan tidak aman. Pendapat kedua mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya tidak wajib baik dalam situasi aman tentram, maupun dalam keadaan tidak aman. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib bila dalam keadaan kacau, tetapi tidak wajib jika dalam situasi aman tentram. Sedangkan pendapat keempat mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib dalam keadaan aman, dan tidak wajib jika dalam kondisi genting karena terjadi banyak kekacauan.³⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. tidak menyebutkan tata cara pengangkatan seorang pemimpin. Namun, secara umum

³⁴Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan* (Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hal. 6-7.

³⁵Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan* (Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hal. 7.

memberikan petunjuk betapa pentingnya hadir seorang pemimpin di tengah kehidupan masyarakat dalam lingkungan keluarga hingga kehidupan bernegara yang lebih luas dengan memberikan kriteria seorang pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang benar atau jujur (*shidiq*), dapat dipercaya (amanah), pintar atau cerdas (*fatonah*), dan terbuka dalam menyampaikan informasi (*tabligh*). Melihat kondisi tersebut, masyarakat diberikan pilihan sepenuhnya untuk mencari cara ataupun solusi untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Rasulullah saw. tidak menetapkan cara mengangkat seorang pemimpin, karena itu para sahabat ketika Rasulullah saw. wafat, persoalan yang muncul di tengah-tengah sahabat adalah terkait dengan siapa yang berhak menggantikan beliau. Hal tersebut dapat dilihat ketika beberapa sahabat berkumpul di *tsakifah bani saidah*.³⁶ Melihat kondisi tersebut bahwa betapa pentingnya seorang pemimpin hadir ditengah masyarakat dengan kriteria yang sesuai dengan syariat Islam memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan untuk memilih seorang pemimpin dan tentunya hal ini menunjukkan betapa demokratisnya ajaran agama Islam untuk memilih seorang pemimpin.

c. Prinsip-Prinsip Suksesi dalam Islam

Secara umum suksesi atau pewarisan kekuasaan diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan tradisi (sunah) Rasulullah saw. Ada beberapa prinsip dan aturan dalam Islam terkait suksesi, di antaranya adalah sebagai berikut:

³⁶Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan* (Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hal. 12.

- 1) Kepemimpinan di dalam Islam diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga Nabi Muhammad saw., yaitu keluarga *ahlul bait*. Hal ini dikenal dengan istilah Imamah. Imamah bukanlah kekuasaan politik, namun lebih pada fungsi spiritual dan kepemimpinan moral dalam masyarakat muslim.
- 2) Kepemimpinan politik diwariskan oleh pemimpin sebelumnya ke pemimpin berikutnya melalui pemilihan atau penunjukan. Pemimpin baru harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki integritas, kejujuran, kecerdasan, dan pengalaman yang memadai.
- 3) Pemilihan pemimpin harus dilakukan secara adil dan demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan calon-calon pemimpin yang terbaik.
- 4) Pemimpin harus mematuhi hukum dan prinsip-prinsip syariah, serta berusaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
- 5) Kekuasaan dan posisi kepemimpinan dalam Islam bukanlah milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan amanah dari Allah swt. yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.

Dalam Islam, suksesi dianggap sebagai hal yang penting untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip suksesi yang berdasarkan pada hukum syariah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik untuk memastikan kelangsungan pemerintahan yang adil dan merakyat. Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang baik dan adil dalam sistem pemerintahan. Ada beberapa kriteria yang disebutkan dalam Islam tentang sifat-sifat seorang pemimpin yang ideal, yaitu

amanah (terpercaya), adil, berilmu, bijaksana, memiliki pengalaman dan memiliki rasa empati.

Dari kriteria-kriteria tersebut, walaupun tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemimpin harus dipilih secara demokratis. Namun, Islam mendorong partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Dalam konteks sejarah, pemilihan pemimpin dalam Islam dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau *syura*, di mana para pemimpin dipilih melalui konsensus antara para pemimpin dan masyarakat. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Islam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan pemimpin mereka, tetapi tidak menetapkan secara spesifik bahwa pemilihan harus dilakukan secara demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin merupakan gambaran prinsip demokratis dalam islam. Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin merupakan gambaran prinsip demokratis dalam Islam yang sangat penting. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Dalam Islam, proses pemilihan pemimpin harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Para pemimpin harus dipilih berdasarkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas, integritas, dan kompetensi yang baik. Proses pemilihan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Dalam banyak tradisi Islam, pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah atau *syura*, yaitu sebuah proses konsultasi

dan diskusi yang dilakukan oleh para pemimpin atau tokoh masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik. Proses musyawarah ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin, sehingga keputusan yang diambil lebih mewakili kehendak masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin merupakan gambaran prinsip demokratis dalam Islam yang sangat penting. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dan dipilih, dan pemilihan harus dilakukan secara adil dan transparan, serta harus mewakili kehendak masyarakat secara keseluruhan.

5. Kerajaan Nepo

Kerajaan Nepo atau Kerajaan Mallusetasi merupakan salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Berdasarkan naskah lontara, Kerajaan Nepo berada di bagian pesisir barat dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya, kerajaan Nepo merupakan kerajaan mandiri yang terdiri dari sejumlah wanua-wanua yang bersatu dalam satu kerajaan. Seiring perkembangannya, Kerajaan Nepo dipengaruhi oleh Kerajaan Bone, Kerajaan Suppa, Kerajaan Soppeng Riaja, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Luwu. Raja pertama dari Kerajaan Nepo bernama La Bongo yang merupakan putra bangsawan dari Kerajaan Suppa. Kerajaan Nepo memiliki pengaruh yang lebih kecil di wilayah Mallusetasi bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Ajatappareng.³⁷

³⁷ Duli, *et al., eds., Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Makassar; Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar), h, 129.

Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16, bersamaan ketika itu Raja Gowa, I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna. Sementara To Palaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga. Jadi bisa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja di Kerajaan Nepo merupakan keturunan dari bangsawan Luwu dan Tanete.

Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar *Puang Pitue*. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang. Puang Pitue kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh Puang Pitue, mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa. Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo.³⁸

Uniknya Kerajaan Nepo pernah dipimpin oleh 40 raja secara bersama-sama, keempat puluh raja ini kemudian digelari *Arung Patappuloe*. Keempat puluh raja ini masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan.³⁹ Hal tersebut sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Makmur disebutkan bahwa masa awal terbentuknya Kerajaan Nepo dipimpin oleh empat puluh raja (*Arung*

³⁸ Makmur. Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi. *Jurnal Walanae*. November 2017. Vol. 15, No. 2.

³⁹ Rasyid Asba. *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), h. 67.

Patappulo). Sebagaimana tertulis dalam naskah *lontara* milik Yusuf H.A, disebutkan bahwa:

“Dahulu di Nepo ada empat puluh 40 *arung*, mereka bersama-sama mengatur jalannya pemerintahan di Nepo. Mereka yang masih dicatat namanya dalam *lontara* ialah *Arung Talabangi*, *Arung Pacciro*, *Arung Tagalinci*, *Arung Pabiugeng*, *Arung Latunreng*, *Arung Lagelo*, *Arung Masiku*, *Arung Ngonynyi*, *Arung Marowanging*, *Arung Dusu*, *Arung Atapang*, dan lainnya”.⁴⁰

Dalam proses kepemimpinan oleh empat puluh raja sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan menyangkut mereka. Karena kepentingan antara satu raja dengan raja yang lain berbeda-beda, bahkan sering berujung perang saudara antara satu kelompok dengan kelompok lain karena perbedaan pandangan atau satu kelompok ingin menguasai kelompok yang lain. Hal itulah yang kemudian mendorong berbagai raja bermusyawarah untuk membicarakan fenomena sosial tersebut. Maka muncullah inisitif dari beberapa *arung* untuk mencari pemimpin untuk mereka, seperti di dalam naskah *lontara* Nepo milik Yusuf H.A, disebutkan:

“Dua tiga dari *Arung Patappulo* kemudian berani mengangkat bicara dengan berkata: “Ada baiknya apabila kita membuat kesepakatan untuk mencari seseorang yang menjadi *Arung* untuk memimpin kita semua *Arung Patappuloe*. Namun, janganlah *Arung Tallabangi* statusnya sama saja dengan kita”. Akhirnya pertemuan itu orang Nepo melahirkan kesepakatan bersama, *Arung Patappulo* akan berangkat ke Suppa’ untuk berjumpa dengan Datu Suppa’. Mereka sepakat akan meminta seorang turunan bangsawan Suppa’ untuk mengangkatnya sebagai raja di Népo. Raja itu kemudian akan dijadikan sebagai pemimpin para *Arung Patappulo*. Meskipun demikian, kekuasaan tetap berada pada diri para *Arung Patappulo* secara bersama-sama. Raja Nepo hanya menjadi pemimpin para *Arung Patappulo*”.⁴¹

Setelah mereka bertemu dengan Datu Suppa’, mereka meminta keturunan dari Datu Suppa’ untuk menjadi raja di Nepo dan Datu Suppa’ menyetujui

⁴⁰ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 119.

⁴¹ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 119.

permintaan empat puluh raja Nepo, maka ditunjuklah anaknya yang belum mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu La Bongo. Meski La Bongo adalah orang bodoh dan tidak mempunyai harta akan tetapi empat puluh raja siap menerima konsekuensi tersebut dan akan membuat La Bongo menjadi pintar dan berharta.

Datu Suppa' pun berucap:

“*Datu Suppa'* Teddung Lompoe menyambut ucapan Hadat Nepo dan berkata: “Wahai, Nepo! Tinggi pengharapanmu pada anak kita, justru itu tinggi pula rasa kesyukuranku atas harapanmu pada diri saya. Semoga Tuhan memberi kalian kepuasan dalam mencari pemimpin. Kami senang karena hambalah yang mencari tuan. Engkau mengatakan bahwa engkau menelusuri turunan bangsawan Tomanurung yang dihormati untuk memerintah di Népo. Oleh karena itu, saya berucap kepada kalian para pamanku serta para saudaraku di Nepo bahwa, orang yang dapat menjaga kalian agar tidak hampa dan menyelimuti agar tidak kedinginan adalah orang yang diberi petunjuk oleh Dewata Yang Esa serta memiliki empat kekuatan sempurna”.⁴²

Di situlah awal proses transformasi dari kepemimpinan kolektif (empat puluh raja) menjadi kepemimpinan yang tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bonggo*. Permintaan *Arung Pattapulo* kepada *Datu Suppa' Teddung Lompoe* bukan hanya pertimbangan keturunan raja, tetapi juga pertimbangan keamanan dan jalur perdagangan. Karena pada masa itu Kerajaan *Suppa'* punya pengaruh besar di wilayah pesisir barat pulau Sulawesi Selatan. La Bongo adalah putra dari *Datu Suppa'* yang bernama Teddung Lompoe, sementara ibunya bernama *Arung Cempa* dari Sawitto.

Permintaan Empat puluh raja Nepo ke *Datu Suppa'*, agar keturunannya menjadi raja di Nepo merupakan hubungan simbiosis mutualisme, dimana dua pelah pihak samasama saling menguntungkan. Pihak Kerajaan *Suppa'* mendapatkan

⁴² Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 120.

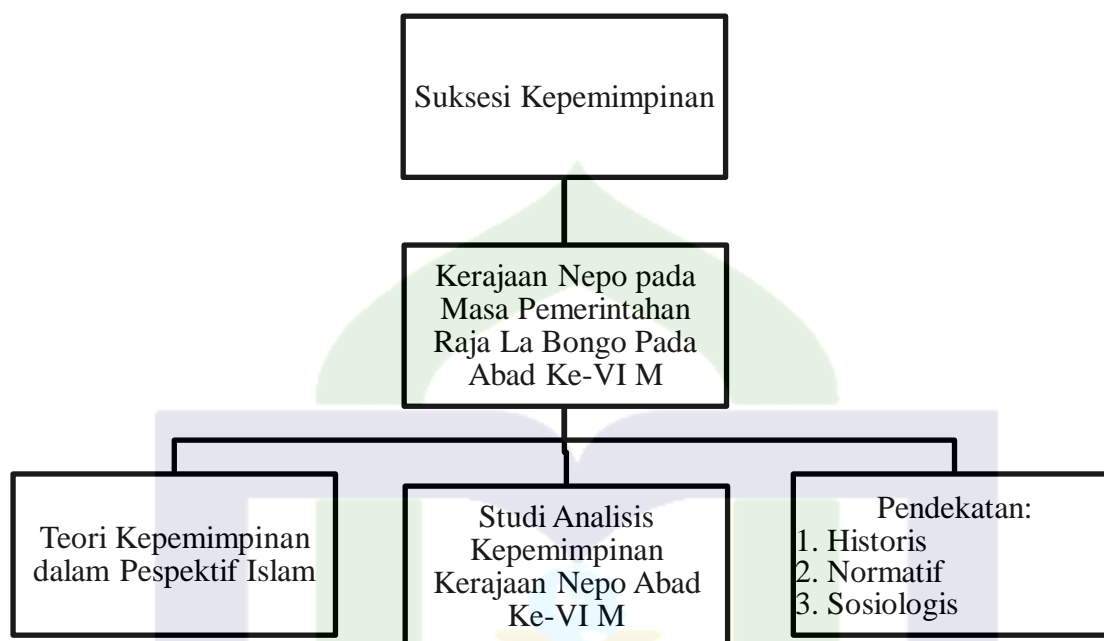
keuntungan memperluas wilayah kekuasaan sehingga Kerajaan Nepo merupakan Palili Passajinge (kerajaan bagian yang didasarkan oleh hubungan kekeluargaan), Kerajaan Nepo berkewajiban memberikan upeti sebesar 4 real (Lontara Manuba). Sedangkan keuntungan bagi Kerajaan Nepo adalah mendapatkan perlindungan oleh Kerajaan Suppa', dimana pada masa itu Kerajaan Suppa' merupakan kerajaan terbesar di pesisir barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Suppa' juga pada masa itu sudah punya kontak dagang dengan pihak-pihak luar, sehingga mempermudah bagi Kerajaan Nepo untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian mereka. Selain keuntungan ekonomi, Kerajaan Nepo terhindar dari perang saudara antar empat puluh raja (Arung Pattapulo).⁴³

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁴⁴ Berikut ini penulis mencoba menjelaskan permasalahan yang diteliti tentang suksesi kepemimpinan di Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam Perspektif Islam dalam bentuk skema sebagai berikut:

⁴³ Makmur, "Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi". *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 120.

⁴⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

I. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dengan sistimatis untuk mewujudkan kebenaran.

Metode penelitian ialah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Beberapa deskripsi bagian-bagian yang memuat metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah (historis) untuk mennguji dan menganalisis secara kritis sejarah masa lampau. Penggunaan metode historis menurut Edson untuk menggambarkan permasalahan atau pernyataan untuk diselidiki, mencari sumber tentang fakta historis, meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis, dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam suatu kerangka interpretasi.⁴⁵ Metode sejarah adalah cara yang dilakukan untuk mengkaji suatu peristiwa, tokoh atau permasalahan yang dianggap layak dan penting yang terjadi pada masa lampau secara deskriptif, kritis dan analitis. Penulisan sejarah tidak hanya mengungkapkan peristiwa secara kronologis, namun lebih dari itu perlu adanya kajian dan analisis tajam yang didukung dengan teori relevan.

Penelitian ini mengambil tema analisis suksesi kepemimpinan sebuah kerajaan di masa lalu yaitu Kerjaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo berdasarkan perspektif Islam yang terjadi beberapa abad silam tentu sudah tidak dijangkau oleh peneliti. Metode historis dalam penelitian didukung juga dengan penggunaan pendekatan interdisipliner, hal ini sebagai alat bantu dalam menganalisis suatu permasalahan. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu seosial secara berimbang, tanpa adanya dominan.⁴⁶

Menurut Gottschalk, membagi langkah-langkan penelitian sejarah menjadi enam tahapan, yaitu:

⁴⁵ Supardan & Dadang H, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendidikan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 306.

⁴⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 240.

- a. Memilih suatu topik yang sesuai;
- b. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
- c. Membuat catatan tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung;
- d. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber);
- e. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan-catatan fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya;

Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah penelitian yang dikembangkan oleh Helius Sjamsudin. Seperti yang diketahui bahwa metode penelitian sejarah terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, intepreatsi, dan historiografi.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara melihat atau sudut pandang dan memperlakukan permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan historis, agama, normatif, dan sosiologis. Untuk lebih jelas penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah atau historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang mempengaruhi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah

⁴⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 89.

sejarah berkaitan dengan topik pembahasan.⁴⁸ Pendekatan historis adalah penelaahan sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau secara sistematis atau pendekatan penelitian yang mendeskripsikan gejala yang tidak terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh sudut pandang secara holistik tentang suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan pemahaman yang seharusnya tentang suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam. Sehingga, suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo akan dikaji secara mendalam berdasarkan kajian Islam.⁴⁹

c. Pendekatan Sosiologis

Adapun pendekatan sosiologis adalah pendekatan menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo akan dikaji secara mendalam berdasarkan kajian Islam.

⁴⁸S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Cet. IV; PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011), h. 16.

⁴⁹ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta; Academia, 2010), h. 190.

⁵⁰ U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 127-128.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data pada penelitian ini diambil dari berbagai jenis data. Pada penelitian ini, terdapat beberapa jenis data yang digunakan yaitu data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu yaitu data yang dikumpulkan akan berwujud kata-kata dalam kalimat yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang menjadi masalah, menganalisisnya, dan menafsirkan data yang ada.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber mutlak dalam penelitian pustaka. Data primer juga dapat diperoleh melalui benda-benda peninggalan sejarah seperti; bukti tertulis tertulis, benda-benda peninggalan arkeologi, dan catatan perjalanan orang asing.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data utama yang akan digunakan oleh peneliti. Karena mengingat pelaku sejarah dan saksi sejarah sangat sulit untuk ditemukan, bahkan untuk pelaku sejarah sudah tidak dapat lagi dijangkau oleh peneliti. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan lebih cenderung menggunakan data sekunder seperti; buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan ilmiah, maka dipergunakan beberapa metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.⁵¹ Sehingga dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi untuk mendapatkan informasi dan data melalui pengamatan yang terdapat pada lokasi penelitian pada sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Nepo menggunakan pedoman observasi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, buku dan sumber-sumber digital yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja Bango dalam perspektif Islam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Adapun dokumen-

⁵¹ S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 159.

dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.⁵²

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa di analisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, dan menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data. Suatu penelitian yang efektif dan efisien, bila semua data yang dikumpulkan dapat di analisis dengan teknik analisis tertentu. Itulah kiranya, pada saat merancang penelitian sudah harus dipikirkan data yang akan dikumpulkan dan teknik analisis data yang akan digunakan.⁵³

Dalam metode penelitian ini penulis melakukan kegiatan penelitian melalui tahap-tahap kerja yang lebih spesifik dan merupakan ciri khas yang membedakan dengan penelitian sosial lainnya, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber.⁵⁴ Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat dimana atau siapa dan cara memperolehnya. Penelitian ini dalam proses pengambilan data melalui proses *library research* (penelitian pustaka). Sumber

⁵² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 222.

⁵³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (UIN: Maliki Press, 2010), h. 119.

⁵⁴ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 219.

data yang digunakan ada dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder.⁵⁵

b. Verifikasi atau Kritik Sumber

Setelah sumber ditemukan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk melakukan pengujian terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum digunakan. Sebab tidak semuanya langsung digunakan dalam penulisan. Dua sumber yang dikritik ialah otentisitas (internal) dan kredibilitas (eksternal).⁵⁶ Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu kepada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah, kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber.⁵⁷

c. Interpretasi

Tahapan atau sering disebut analisis (penafsiran). Analisis sendiri mempunyai pengertian menguraikan dan secara terminology berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun kedua metode ini merupakan hal yang paling utama dalam interpretasi. Tahap ini penting karena merupakan upaya untuk mengkronologikan sebuah peristiwa sejarah, sehingga menghasilkan kontruksi sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang terdapat dalam referensi, sehingga diharapkan menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.⁵⁸

⁵⁵Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 44.

⁵⁶M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, h. 223.

⁵⁷M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, h. 224.

⁵⁸Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 27.

d. Historiografi

Tahapan ini adalah tahap akhir dari penelitian dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah. Pada tahap penulisan, penulis menyajikan laporan hasil penelitian dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah- masalah yang harus dijawab.⁵⁹ Tahapan ini merupakan penyajian hasil penelitian dari data yang diperoleh kedalam bentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian. Penulis berusaha menyajikan penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika yang telah disajikan.

⁵⁹Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, h. 28.

BAB II

SUKSESI KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA BONGO

Di Indonesia, ada banyak kerajaan yang telah mengalami suksesi kepemimpinan sepanjang sejarahnya. Beberapa contoh terkenal termasuk Kerajaan Majapahit, Mataram Kuno, dan Sriwijaya. Suksesi kepemimpinan dalam kerajaan-kerajaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan dan tradisi masing-masing kerajaan. Dalam beberapa kerajaan, suksesi kepemimpinan dapat berlangsung secara heredit, di mana tahta diwariskan dari raja atau ratu yang memerintah kepada anggota keluarganya yang dipilih atau ditunjuk. Contoh yang terkenal adalah suksesi di Kerajaan Mataram Kuno, di mana tahta sering kali diwariskan dari ayah ke putra.

Namun, tidak semua kerajaan memiliki sistem suksesi yang sama. Beberapa kerajaan menggunakan sistem pemilihan atau consensus di antara elit pemerintahan, keluarga kerajaan, atau tokoh-tokoh penting masyarakat. Selain itu, terdapat pula kerajaan-kerajaan yang mengalami perubahan kepemimpinan akibat invasi atau penaklukan kerajaan lain. Contohnya adalah penaklukan Kerajaan Majapahit oleh Kerajaan Demak pada abad ke-16. Setiap kerajaan memiliki sejarah dan tradisi sendiri dalam hal suksesi kepemimpinan dalam kerajaan tertentu di Indonesia, perlu diperhatikan nama kerajaan dan periode waktu tertentu yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan analisis proses suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada masa pemerintahan Raja La Bongo yaitu peralihan kepemimpinan dari *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) dengan kepemimpinan kolektif menjadi kepemimpinan yang tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo*.

Sebelum itu dijelaskan proses suksesi, maka terlebih dahulu dijelaskan Sejarah Awal Kerajaan Nepo hingga sampai pada Raja La Bongo dari

Kerajaan Nepo atau Kerajaan Mallusetasi merupakan salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Berdasarkan naskah lontara, Kerajaan Nepo berada di bagian pesisir barat dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya, kerajaan Nepo merupakan kerajaan mandiri yang terdiri dari sejumlah wanua-wanua yang bersatu dalam satu kerajaan. Seiring perkembangannya, Kerajaan Nepo dipengaruhi oleh Kerajaan Bone, Kerajaan Suppa, Kerajaan Soppeng Riaja, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Luwu.⁶⁰

Kabupaten Barru, yang saat ini berada di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki latar belakang kultur yang kaya. Secara historis, wilayah ini berdiri di atas bekas sistem konfederasi yang dikenal dengan *Passiajingeng* dalam Bahasa Bugis. Kabupaten Barru secara majemuk terdiri dari beberapa wilayah yang berasal dari empat kerajaan, yaitu Berru (Barru), Tanete (Agang Nionjo'), Balusu, dan Kiru-Kiru (Soppeng Riaja), serta Nepo (Mallusetasi). Sebagai bagian dari sejarah, Kabupaten Barru memiliki warisan masa lalu yang megah dan kaya dengan norma dan nilai-nilai yang unik. Wilayah ini menjadi salah satu peradaban Nusantara yang memiliki kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang maju. Norma-norma dan nilai-nilai ini membentuk wilayah yang khas bagi masyarakat Barru.⁶¹

Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16, bersamaan ketika itu Raja Gowa, I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo

⁶⁰Duli, *et al.*, eds., *Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (Makassar; Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar), h. 129.

⁶¹ Andi M. Anwar Zaenong, "Sejarah Kerajaan Barru Sulawesi Selatan" *Dosen IAIN Parepare/STAI Ambo Dalle' DDI Mangkoso Sulawesi Selatan* (2017), h. 2.

dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna. Sementara To Palaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga. Jadi bisa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja di Kerajaan Nepo merupakan keturunan dari bangsawan Luwu dan Tanete.

Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar *Puang Pitue*. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang. *Puang Pitue* kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh *Puang Pitue*, mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa. Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo.⁶²

Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh) itu terdiri dari satu keluarga sampai sepupu sekali. Merekalah yang pertama kali berkuasa di nepo dengan memegang pemerintahan dalam satu wilayah. Namun nama *Arung Patappuloe* yang pernah memerintah, tidak disebutkan dalam lontara seluruhnya, hanya beberapa saja yang disebutkan di antaranya Arung Talabangi, Arung Pacsciro, Arung Pabbiung-ngeng, Arung Lattureng, Arung Langello, Arung Masikku, Arung Ngormyi, Arung Cimpu, Arung Ma-roanging, Arung Dusung, Arung Ngatappa dan lainnya.⁶³ Hal tersebut sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Makmur disebutkan bahwa masa awal

⁶² Makmur. Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi. *Jurnal Walanae*. November 2017. Vol. 15, No. 2.

⁶³A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 40.

terbentuknya Kerajaan Nepo dipimpin oleh empat puluh raja (*Arung Patappulo*). Sebagaimana tertulis dalam naskah *lontara* milik Yusuf H.A, disebutkan bahwa:

“Dahulu di Nepo ada empat puluh 40 *arung*, mereka bersama-sama mengatur jalannya pemerintahan di Nepo. Mereka yang masih dicatat namanya dalam *lontara* ialah *Arung Talabangi*, *Arung Pacciro*, *Arung Tagalinci*, *Arung Pabiugeng*, *Arung Latunreng*, *Arung Lagelo*, *Arung Masiku*, *Arung Ngonynyi*, *Arung Marowanging*, *Arung Dusu*, *Arung Atapang*, dan lainnya”.⁶⁴

Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa *Arung Patappuloe* memerintah, tidak ada yang berkuasa penuh. Mereka berkuasa semuanya. Dalam proses kepemimpinan oleh empat puluh raja sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan menyangkut mereka. Karena kepentingan antara satu raja dengan raja yang lain berbeda-beda, bahkan sering berujung perang saudara antara satu kelompok dengan kelompok lain karena perbedaan pandangan atau satu kelompok ingin menguasai kelompok yang lain. Hal itulah yang kemudian mendorong berbagai raja bermusyawarah untuk membicarakan fenomena sosial tersebut. Namun upaya alternatif itu tidak langsung diperolehnya. Terdapat kisah sejarah yang menarik yang menggambarkan situasi politik dan pemerintahan pada masa itu.⁶⁵

Pada suatu waktu, Datu Suppa mengadakan undangan kepada raja-raja disekitarnya, termasuk pula Kerajaan Nepo mendapat undangan. Tetapi apa yang terjadi, ketika *Arung Patappuloe* tiba di tempat undangan (Suppa), maka dicarilah siapa *Arung Nepo* atau rajanya untuk dipersilahkan ke tempat yang telah dipersiapkan oleh Datu Suppa, sama halnya dengan raja-raja lainnya yang diundang pada acara tersebut. Saat ditanya tentang raja dari mereka yang datang maka dengan spontan mereka

⁶⁴Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 119.

⁶⁵A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 41.

menjawabnya bahwa kamu semua adalah Arung Nepo. Tentu hal ini membuat tercengang dan heran Datu Suppa. Apalagi kondisi saat itu hanya sedikit tempat yang disediakan dan tidak bisa menampung mereka semua yang berjumlah 40 orang. Sehingga Datu Suppa menempatkan mereka semua di bawah kolong dengan mendapatkan peralatan dari Daun Wuncung, karena persediaan tidak cukup mengingat banyaknya.⁶⁶

Setelah kejadian itu, semakin kuat untuk membicarakan kembali ikhwal keberadaan mereka sebagai arung, mengingat pengalaman undangan Datu Suppa tersebut. Merekapun bersepakat untuk bermusyawarah guna mencari seorang Arung untuk berkuasa di Nepo. Pada proses pencarian raja untuk memimpin mereka, maka disepakati bersama untuk mengirim utusan ke Suppa untuk bertemu Datu agar diberikan orang yang dapat memerintah di negeri mereka. Hal tersebut mendapat sambutan baik oleh Datu Suppa.⁶⁷ Sejalan dengan kisah tersebut juga dijelaskan dalam naskah *lontara* Nepo milik Yusuf H.A, disebutkan:

“Dua tiga dari *Arung Patappulo* kemudian berani mengangkat bicara dengan berkata: “Ada baiknya apabila kita membuat kesepakatan untuk mencari seseorang yang menjadi *Arung* untuk memimpin kita semua *Arung Patappuloe*. Namun, janganlah *Arung Tallabangi* statusnya sama saja dengan kita”. Akhirnya pertemuan itu orang Nepo melahirkan kesepakatan bersama, *Arung Patappulo* akan berangkat ke Suppa’ untuk berjumpa dengan Datu Suppa’. Mereka sepakat akan meminta seorang turunan bangsawan Suppa’ untuk mengangkatnya sebagai raja di Népo. Raja itu kemudian akan dijadikan sebagai pemimpin para *Arung Patappulo*. Meskipun demikian, kekuasaan tetap berada pada diri para *Arung Patappulo* secara bersama-sama. Raja Nepo hanya menjadi pemimpin para *Arung Patappulo*”.⁶⁸

⁶⁶A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupeten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 41.

⁶⁷A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupeten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 41.

⁶⁸Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 119.

Setelah mereka bertemu dengan Datu Suppa', mereka meminta keturunan dari Datu Suppa' untuk menjadi raja di Nepo dan Datu Suppa' menyetujui permintaan empat puluh raja Nepo, maka ditunjuklah anaknya yang belum mempunyai jabatan atau kedudukan dan hanya tinggal di rumah saja, juga belum berkeluarga. Dia dianggap orang yang bodoh sehingga diberikan nama La Bongo. Secara silsilah keluargaan La Bongo merupakan putra Datu Suppa Taddung Lompoe dengan Ibunya, Arung Cempa dari Saitto yang tidak diketahui namanya. Arung La Bongo memiliki lima orang saudara yaitu La Mariase, La Bulang, Topoci, La Timang, dan I Mammi, ia menjadi anak ke-lima dari Datu Suppa Taddung Lompoe.⁶⁹

Pertimbangan *Arung Patappulo* bersama Datu Suppa Taddung Lompoe memilih La Bongo untuk menjadi Raja Nepo disamping La Bongo karena memiliki darah keturunan bangsawan yang dianggap lebih tinggi derajatnya dari mereka (*Arung Patappuloe*) sebab ia keturunan Datu Suppa Taddung Lompoe bukan *Arung Tallabangi* yang statusnya sama saja dengan mereka (*Arung Patappuloe*). Selain itu, pertimbangan strategis para *Arung Patappuloe* melihat Kerajaan Suppa pada masa itu memiliki kekuasaan yang diakui di wilayah Ajatappareng sehingga dengan diangkatnya bangsawan Suppa akan memberikan efek gentar bagi Kerajaan yang berada disekitar Kerajaan Nepo. Pertimbangan lainnya, saudara-saudara La Bongo yang lain telah memiliki kedudukan atau jabatan maka ditunjuklah La Bongo menjadi Raja Nepo untuk memimpin *Arung Patappuloe*.

Meski La Bongo adalah orang bodoh dan tidak mempunyai harta akan tetapi empat puluh raja siap menerima konsekuensi tersebut dan akan membuat La Bongo menjadi pintar dan berharta. *Datu Suppa'* pun berucap:

⁶⁹A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 42-45.

“*Datu Suppa*’ Teddung Lompoe menyambut ucapan Hadat Nepo dan berkata: “Wahai, Nepo! Tinggi pengharapanmu pada anak kita, justru itu tinggi pula rasa kesyukuranku atas harapanmu pada diri saya. Semoga Tuhan memberi kalian kepuasan dalam mencari pemimpin. Kami senang karena hambalah yang mencari tuan. Engkau mengatakan bahwa engkau menelusuri turunan bangsawan Tomanurung yang dihormati untuk memerintah di Népo. Oleh karena itu, saya berucap kepada kalian para pamanku serta para saudaraku di Nepo bahwa, orang yang dapat menjaga kalian agar tidak hampa dan menyelimuti agar tidak kedinginan adalah orang yang diberi petunjuk oleh Dewata Yang Esa serta memiliki empat kekuatan sempurna”.⁷⁰

Pengangkatan La Bongo menjadi Arung Nepo didasari pertimbangan politik pada waktu itu. Pertama, untuk menghindari perang atau permusuhan di antara raja-raja *Arung Patappuloe* satu sama lain karena masing-masing mereka ingin berkuasa. Apabila raja yang dipilih di antara mereka maka beresiko akan dikudeta oleh arung yang lainnya. Kedua, dengan menjadikan La Bongo sebagai raja akan mencegah serangan dari kerajaan-kerajaan tetangganya yang pada saat itu sangat ingin menguasai Kerajaan Nepo karena ia merupakan anak dari Datu Suppa yang cukup disegani dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan di *Ajatappareng* di masa itu. Kedua pertumbangan tersebut menjadi sangat masuk akal sehingga keputusan disepakati oleh selurung *Arung Patappuloe*.⁷¹

Setibanya di Nepo, La Bongo masih berstatus bujang sehingga ia dikawinkan dengan seorang putri *Arung Mareppang*. Selama perkiwinannya, mereka tidak memiliki keturunan untuk menggantikannya menjadi raja selanjutnya untuk memerintah Kerajaan Nepo. Pada saat La Bongo memerintah di Kerajaan Nepo, di daerah atau wilayah lain juga diperintah oleh Arung. Mareppang diperintah oleh Arung

⁷⁰ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *Jurnal Walennae*, 15.2 (2017), hal. 120.

⁷¹ A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 43.

Mareppang, yang bernama Imantasa, yang juga adalah mertua dari La Bongo. Kemudian Kerajaan Manuba diperintah oleh Arung Manuba. Selanjutnya, wilayah lain yaitu Kerajaan Marongin (sekarang Palanro) diperintah oleh La Timang atau saudara kandung La Bongo. Kerajaan Talabangi diperintah oleh Raja Talabangi (namanya tidak diketahui). Sementara itu, Kerajaan Mallawa diperintah oleh Daeng Pagoli, juga dari Suppa. Terakhir, daerah Dusung diperintah oleh Arung Dusung (namanya tidak diketahui).⁷²

Selain membantu menjalankan roda pemerintahan La Bongo sebagai raja mereka, *Arung Patappuloe* juga berfungsi sebagai penasehat *Arung Nepo* (La Bongo).⁷³ Di situlah awal proses transformasi dari kepemimpinan kolektif (empat puluh raja) menjadi kepemimpinan yang tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo*.

Berdasarkan analisis penulis menggunakan metode heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi tentang proses suksesi di atas menunjukkan proses suksesi kepemimpinan di Kerajaan Nepo dimulai dari raja pertamanya atau didirikan oleh Baso Tungke, kemudian kepemimpinan Baso Tungke selanjutnya diserahteruskan kepada anak-anaknya yang bergelar *Puang Pitue*. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang. *Puang Pitue* kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang. Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo. Mulai dari sinilah proses suksesi kepemimpinan *Arung Patappuloe* (Raja Empat

⁷² A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 45.

⁷³ A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 43.

Puluh) menjadi kepemimpinan yang tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo* yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kerajaan ini memiliki sejarah kepemimpinan unik, dimana pada saat Kerajaan ini dipimpin oleh empat puluh raja yang memimpin secara bersama-sama. Namun, perannya sebagai pemimpin hanya sebagai kepala suku-suku yang bersatu, sedangkan kekuasaannya tetap berada pada *Arung Patappuloe* secara kolektif. Dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara *Arung Patappuloe* yang dengan secara bersama menjalankan roda pemerintahan dalam Kerajaan Nepo membuat keadaan dan pengambilan keputusan semakin sulit karena perbedaan kepentingan antara raja dengan raja yang lain.

Proses suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo dimulai dengan munculnya inisiatif dari beberapa *Arung Patappuleo* untuk mencari pemimpin tunggal yang dapat mengatur jalannya pemerintahan lebih efektif. Mereka sepakat untuk mencari seorang turunan bangsawan *Suppa'* yang akan diangkat sebagai raja Nepo. *Arung Patappuloe* melakukan musyawarah untuk mencari pemimpin dalam rangka mengatasi kesulitan, beberapa *Arung Patappuleo* mengusulkan untuk mencari seorang pemimpin yang akan menjadi *Arung* dan memimpin mereka. Keputusan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan bersama, tetapi dengan adanya pemimpin tunggal. Mereka sepakat untuk mencari seorang turunan bangsawan *Suppa'* untuk menjadi raja di Nepo.

Dalam proses ini, raja Nepo mengirim empat puluh perwakilan mereka untuk bertemu *Datu Suppa'* dan meminta keturunannya untuk menjadi raja di Nepo. Setelah bertemu dan berdiskusi dengan *Datu Suppa'*. Keempat puluh raja utusan Nepo meminta keturunan dari *Datu Suppa'* yang belum memiliki jabatan untuk menjadi raja

di Nepo. La Bongo ditunjuk sebagai raja, meskipun ia tidak memiliki kekayaan atau pengetahuan dan pengalaman dalam memerintah, para *Arung Patappuloe* bersedia menerima konsekuensi tersebut dan berkomitmen untuk membuatnya pintar dan berharta. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kerajaan Nepo tidak hanya berdasarkan status atau harta, tetapi juga didasarkan pada pengakuan dan persetujuan raja-raja pada waktu itu. Hal ini juga menunjukkan pergeseran dari sistem suksesi kepemimpinan berdasarkan keturunan ke sistem suksesi berdasarkan kesepakatan dan pemilihan.

Transformasi kepemimpinan kolektif dari *Arung Patappuloe* menjadi kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo*. Meskipun *Arung La Bongo* telah diangkat menjadi pemimpin, kekuasaan tetap berada di tangan para *Arung Patappuloe* secara bersama-sama. La Bongo hanya menjadi pemimpin para *Arung Patappuloe*. Dalam keseluruhan proses suksesi kepemimpinan di Kerajaan Nepo, terlihat perubahan dari kepemimpinan kolektif yang sulit mengambil keputusan menjadi kepemimpinan tunggal di bawah *Arung La Bongo*. Penunjukan *La Bongo* sebagai raja adalah langkah penting dalam memperkuat otoritas kekuasaan para *Arung Patappuloe*.

BAB III

DAMPAK SUKSESI KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA BONGO

Pada saat La Bongo memerintah di Kerajaan Nepo, di daerah atau wilayah lain juga diperintah oleh Arung. Mareppang diperintah oleh Arung Mareppang, yang bernama Imantasa, yang juga adalah mertua dari La Bongo. Kemudian Kerajaan Manuba diperintah oleh Arung Manuba. Selanjutnya, wilayah lain yaitu Kerajaan Marongin (sekarang Palanro) diperintah oleh La Timang atau saudara kandung La Bongo. Kerajaan Talabangi diperintah oleh Raja Talabangi (namanya tidak diketahui). Sementara itu, Kerajaan Mallawa diperintah oleh Daeng Pagoli, juga dari Suppa. Daerah Dusung diperintah oleh Arung Dusung (namanya tidak diketahui). Terakhir, Kerajaan Bojo.⁷⁴

Kendatipun, La Bongo dianggap bodoh oleh Datu Suppa (Ayahnya), ternyata secara faktual ia memiliki keahlian di bidang politik dan perang dalam memimpin Kerajaan Nepo. Terlebih lagi, dalam memerintah La Bongo juga dibantu oleh *Arung Patappuloe* dan *Puang Ripakka* dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya dengan cara menanam padi sebanyak mungkin, agar supaya tidak terjadi kelaparan pada saat panen tidak berhasil.⁷⁵

Permintaan *Arung Pattapulo* kepada *Datu Suppa' Teddung Lompoe* bukan hanya pertimbangan keturunan raja, tetapi juga pertimbangan keamanan dan jalur perdagangan. Karena pada masa itu Kerajaan Suppa' punya pengaruh besar di wilayah pesisir barat pulau Sulawesi Selatan. La Bongo adalah putra dari *Datu Suppa'* yang

⁷⁴A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 45.

⁷⁵A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Traditional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 51.

bernama Teddung Lompoe, sementara ibunya bernama Arung Cempa dari Sawitto. Secara silsilah keluarga Arung La Bongo, dapat penulis gambarkan pada Gambar. 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 Silsilah Keluarga Arung La Bongo

Secara keseluruhan, dampak suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo mengalami transformasi dari kepemimpinan kolektif dari *Arung Patappuloe* menjadi kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh Raja La Bongo atas permintaan Empat puluh raja Nepo ke Datu Suppa', agar keturunannya menjadi raja di Nepo merupakan hubungan simbiosis mutualisme, dimana dua pelah pihak sama-sama saling menguntungkan. Pihak Kerajaan Suppa' mendapatkan keuntungan memperluas wilayah kekuasaan sehingga Kerajaan Nepo merupakan Palili Passajinge (kerajaan bagian yang didasarkan oleh hubungan kekeluargaan), Kerajaan Nepo berkewajiban memberikan upeti sebesar 4 real (Lontara Manuba). Sedangkan keuntungan bagi Kerajaan Nepo adalah mendapatkan perlindungan oleh Kerajaan Suppa', dimana pada masa itu Kerajaan Suppa' merupakan kerajaan terbesar di pesisir barat Sulawesi Selatan.

Kerajaan Suppa' juga pada masa itu sudah punya kontak dagang dengan pihak-pihak luar, sehingga mempermudah bagi Kerajaan Nepo untuk memasarkan produk-

produk hasil pertanian mereka. Selain keuntungan ekonomi, Kerajaan Nepo terhindar dari perang saudara antar empat puluh raja (Arung Pattapulo).⁷⁶ Selain itu, suksesi kepemimpinan yang terjadi memungkinkan pengaturan pemerintah yang lebih efektif dan menciptakan stabilitas di dalam kerajaan Nepo di bawah pemerintahan La Bongo.

Berikut ini daftar nama-nama penguasa atau raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Nepo, sebagai berikut:

- a. Baso Tungke
- b. Puang Pitue
- c. Arung Patappuloe
- d. Arung La Bongo
- e. Arung I Timang Ratu
- f. Arung La Makkaraka
- g. Arung La Passampoi
- h. Arung La Pabbiseang
- i. Arung La Ippung
- j. Arung La Solong
- k. Arung Laica
- l. Arung I Messang
- m. Arung I Simatanah
- n. Arung Singkeruka
- o. Arung I Makung
- p. Arung La Calo.⁷⁷

⁷⁶ Makmur, “Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi”. *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 120.

⁷⁷ A. Rasyid Asba, *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), h. 69.

Berikut peta Kerjaan Nepo di masa lalu:



Gambar 3.2 Peta Kuno Nepo dan Batu Pute
Sumber: Attoriolong.com⁷⁸

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, menetapkan wilayah Swapraja Mallusetasi, Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja menjadi satu daerah tingkat II Barru yang terdiri dari lima kecamatan, diantaranya Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru, serta Swapraja Tanete dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.

Dengan terbentuknya Kabupatena Barru, maka berakhir lah masa pemerintahan dari Andi La Calo pada tahun 1960. Penghapusan Swapraja Mallusetasi dan dilebur menjadi Kabupaten Barru mengakhiri masa yang cukup panjang dari perjalanan sejarah Kerajaan Nepo.⁷⁹ La Colo sebagai Arung Nepo yang terakhir berkuasa disebabkan pada masa pemerintahannya pengaruh

⁷⁸ Attoriolong. <https://attoriolong.com/2018/03/kisah-arung-la-bongngo-raja-nepo-yang-dianggap-bodoh/>. Diakses: 8 Agustus 2023.

⁷⁹Darwas Rasyid. 1990. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK. II Kabupaten Barru (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1990), h.

colonial meluas dan menguat di Sulawesi Selatan. Berikut Foto La Colo Arung Nepo/Arung Mallusetasi, Raja Nepo/Mallusetasi yang terakhir.



Gambar 3.3 Foto La Colo Arung Nepo/Arung Mallusetasi, Raja Nepo/Mallusetasi yang terakhir
Sumber: Attoriolong.com⁸⁰

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa analisis mendalam terkait dampak suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo pada masa pemerintahan Raja La Bongo. Berikut ini hasil analisis penulis:

1. Transformasi Kepemimpinan

Suksesi kepemimpinan dari kepemimpinan kolektif Arung Patappuloe menjadi kepemimpinan tunggal Raja La Bongo mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Kerajaan Nepo. Transformasi ini dapat mempengaruhi kestabilan politik dan pemerintahan kerajaan.

2. Hubungan Simbiosis Mutualisme

Permintaan Arung Patappuloe kepada Datu' Suppa Teddong Lompoe untuk menjadikan La Bongo sebagai raja bukan hanya didasarkan pada pertimbangan keturunan semata, tetapi juga pertimbangan keamanan dan

⁸⁰ Attoriolong. <https://attoriolong.com/2013/06/silsilah-raja-raja-nepo/>. Diakses: 8 Agustus 2023.

jalur perdagangan. Hubungan simbiosis mutualisme antara Kerajaan Suppa dan Kerajaan Nepo membawa keuntungan bagi kedua pihak, dengan Suppa' mendapatkan pengaruh dan wilayah lebih luas, sementara Nepo mendapatkan perlindungan dan kemudahan dalam perdagangan.

3. Keuntungan Ekonomi dan Perdagangan

Kepemimpinan La Bongo membawa keuntungan ekonomi bagi Kerajaan Nepo, terutama melalui kerjasama, perdagangan dengan Kerajaan Suppa' yang sudah memiliki kontak dagang dengan pihak luar. Dengan demikian, Kerajaan Nepo dapat memasarkan produk pertanian mereka dan terhindar dari perang saudara antara empat puluh raja Nepo sebelumnya.

4. Stabilitas dan Efektivitas Pemerintahan

Suksesi kepemimpinan yang terjadi di bawah pemerintah La Bongo membawa dampak positif terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan Kerajaan Nepo. Hal ini dapat dilihat dari upaya La Bongo dalam menjaga kedaulatan wilayah kerajaannya, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya,

Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, kita dapat memahami lebih dalam tentang perjalanan sejarah, kebijakan politik, dan dampak dari suksesi kepemimpinan dalam konteks Kerajaan Nepo pada masa Pemerintahan Raja La Bongo.

BAB IV
SUKSESI KEPEMIMPINAN KERAJAAN NEPO PADA MASA
PEMERINTAHAN RAJA LA BONGO DALAM
PERSPEKTIF ISLAM

Terdapat beberapa aspek yang akan di analisis terkait proses suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo Pada Masa Pemerintahan La Bongo di antaranya konsensus dan kesepakatan dalam memilih pemimpin, prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan penting, kriteria memilih pemimpin, dan pembagian kekuasaan. Meskipun terdapat perubahan dari kepemimpinan kolektif menjadi kepemimpinan tunggal, prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi acuan penting dalam memilih pemimpin dengan keadilan dan bijaksana. Beberapa hal tersebut yang akan penulis jelaskan dan analisis menggunakan perspektif Islam, berikut penjelasannya:

A. Konsensus dan Kesepakatan dalam Memilih Pemimpin

Proses suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo Pada Masa Pemerintahan La Bongo dilakukan dengan konsensus dan kesepakatan dalam memilih pemimpin yang dilakukan empat puluh raja (*Arung Pattapulo*) bersama Datu Suppa' sehingga terpilihlah Raja La Bongo. Pentingnya consensus dan kesepakatan bersama membuat keputusan tersebut lebih cenderung diakui sebagai sah dan legitim. Partisipasi beberapa pihak dalam proses ini mencerminkan suara dan kepentingan yang beragam, sehingga memberikan otoritas kepada pemimpin yang terpilih.

Mengutip pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi telah menunjukkan lebih tegas bahwa *daulah Islamiyah* bukanlah negara teokrasi

(*daulah diniyah*). Daulah Islamiyah adalah *daulah madaniyah* (negara sipil) yang berkuasa atas nama Islam, berdasarkan proses *bai'at* dan *syura'* memilih pemimpin yang kuat (*qawiy*), dapat dipercaya (amin), dapat diandalkan (*hafidz*) dan berpengetahuan (*'alim*). Ia membedakan teokrasi dan nomokrasi berdasarkan *syari'at* (*daulah syar'iyah dusturiyah*).⁸¹

Relevansinya dengan konsep demokrasi yang dibangun di dunia Barat. Bahwa kekuasaan hendaknya dibangun berdasarkan suara terbanyak (*one man one vote*). Kendatipun, ini sekilas mirip dengan membangun kesepakatan politik seperti halnya "*consensus*" tetapi pada tataran maksud dan tujuan hukum syara' ini tidak bisa disejajarkan dengan "*ijma*". Namun seringkali kita terjebak pada pemahaman bulat bahwa *consensus* dalam politik setara dengan *ijma fi al-syar'i* padahal keduanya memiliki substansi yang berbeda.⁸²

Menganalisis proses suksesi Kerajaan Nepo pada masa pemerintahan La Bongo, proses suksesi dilakukan dengan *consensus* dan kesepakatan dari empat puluh raja (*Arung Patappuloe*) bersama Datu Suppa'. Proses pemilihan ini melibatkan partisipasi beberapa pihak, mencerminkan suara dan kepentingan yang beragam, dan berakhir dengan pemilihan Raja La Bongo. Dengan adanya *consensus* dan kesepakatan, keputusan tersebut lebih cenderung diakui sebagai sah dan legitim, serta memberikan otoritas kepada pemimpin terpilih.

⁸¹Abdul Hamid, "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi" *Adliya*: 9.1 (2015), h. 87-88.

⁸²Abdul Hamid, "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi" *Adliya*: 9.1 (2015), h. 88.

Perbandingan suksesi tersebut dalam perspektif Islam dan suksesi pada masa peralihan Rasulullah saw. kepada Khulafaurrasyidin. Meskipun Rasulullah saw. tidak secara spesifik membahas tentang suksesi kepemimpinan atau pergantian pemimpin, terdapat banyak ayat dan khadits yang menegaskan tanggung jawab pemimpin terhadap yang dipimpin. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah swt. yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Pada masa Khulafaurrasyidin (Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), suksesi kepemimpinan diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah. Beberapa prinsip dan aturan terkait suksesi dalam Islam meliputi:

1. Kepemimpinan politik diwariskan melalui pemilihan atau penunjukan, dan pemimpin harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, kejujuran, kecerdasan, pengalaman yang memadai, dan mematuhi hukum dan prinsip-prinsip syariah.
2. Pemilihan pemimpin harus dilakukan secara adil dan demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat untuk menentukan calon pemimpin terbaik.
3. Pemimpin harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip syariah dan berusaha memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kesimpulannya, suksesi kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan pentingnya pemilihan pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan partisipasi aktif masyarakat. Proses pemilihan ini memastikan pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik dan berkualitas yang diharapkan untuk melayani umat secara adil dan merata. Sementara proses suksesi

Kerajaan Nepo menunjukkan adanya partisipasi dalam memilih pemimpin, namun dengan cara dan substansi yang berbeda dari prinsip-prinsip suksesi dalam Islam.

B. Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Penting

Musyawarah empat puluh raja (Arung Pattapulo) bersama Datu Suppa' dalam suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo Pada Masa Pemerintahan La Bongo tentu cenderung mengurangi ketegangan politik dan perpecahan dalam kerajaan. Pemimpin yang terpilih dengan dukungan luas akan lebih mudah menciptakan iklim politik yang stabil dan memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat Kerajaan Nepo. Sehingga, dengan stabilitas yang terwujud memungkinkan pengaturan Kerajaan lebih efektif dan efisien.

Dalam memilih pemimpin dalam Islam, umat Muslim juga dianjurkan untuk melakukan konsultasi dan musyawarah, dan pemimpin yang dipilih seharusnya merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan umat. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin dalam memilih pemimpin dan proses pengambilan keputusan sangat dihargai dalam Islam.

Masyarakat madinah yang menjadi rujukan konsep negara Islam memiliki gagasan politik yang disebut *syura'* (musyawarah) yaitu ruang terbuka dimana siapapun berhak menyampaikan pendapat pada wilayah dimana siapapun berhak menyampaikan pendapatnya pada wilayah dimana syari'at tidak membatasi secara ketat (misalnya wilayah *mu'amalah*). *Syura'* melebihi demokrasi dalam hal ketersediaan syari'at yang membatasi kekuasaan mayoritas yang memungkinkan tumbuhnya otoritarianisme yang berkedok demokrasi. Dalam konteks inilah, konsep musyawarah sangat relevan dengan demokrasi terutama pada aspek substansi, semangat penentangan tirani, dan prinsip mayoritas. Melalui konsep

musyawarah, negara dalam Islam harus membuka ruang interaksi bagi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan partisipasi politik sebagai bagian dari ibadah dan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁸³

C. Kriteria Memilih Pemimpin

Kriteria pemimpin dalam suksesi kepemimpinan Raja Nepo dari kepemimpinan *Arung Patappuloe* ke pemerintahan *Arung La Bongo* terlihat lebih memfokuskan kepada kriteria pemimpin harus seorang turunan bangsawan sehingga dipilihlah turunan *Arung Suppa'*. Kendati, calon pemimpin yang dipilih belum memiliki pengalaman pemerintahan (kompetensi) dan kemampuan finansial (harta) karena yang terpenting derajat bangsawannya lebih tinggi dari ke empat puluh arung dari Nepo yang dapat memimpin mereka.

Pada zaman modern ini, pertanyaan mengenai kriteria dalam memilih pemimpin menjadi relevan dan sangat penting, terutama dalam konteks Islam. Agama Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana memilih seorang pemimpin yang adil dan berkualitas. Kriteria memilih pemimpin dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., serta prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh para ulama.

Salah satu rujukan penting dalam hal hukum tata negara dan kepemimpinan dalam Islam adalah pandangan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah*. Al-Mawardi memberikan penjelasan bahwa syarat-syarat seorang pemimpin adalah adil, mempunyai kompetensi ijtihad, sempurna dan sehat panca indra, tidak cacat secara fisik, mempunyai visi

⁸³Abdul Hamid, "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi" *Adliya*: 9.1 (2015), h. 88-89.

kemaslahatan sosial, tegas, dan berani. Secara umum hal tersebut menjadi rujukan tentang kriteria pemilihan pemimpin dalam Islam.⁸⁴

Terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam persyaratan atau kriteria seorang kepala negara atau pemimpin, seperti diungkapkan oleh al-Mawardi. Pertama, adalah mengenai kompetensi dan visi seorang pemimpin. Seorang kepala negara harus memiliki keahlian dalam kepemimpinan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fiqih, di antaranya adalah keadilan. Selain itu, kepala negara juga harus memiliki visi yang jelas untuk masa depan negara yang dipimpinnya. Kedua, seorang pemimpin diasumsikan sebagai seorang creator dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, kemahiran seorang pemimpin harus melebihi rata-rata, kepala negara akan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Kemampuan berfikir kreatif, inovatif, dan mengambil keputusan yang tepat sangat penting bagi seorang pemimpin dalam memajukan negaranya.

Ketiga, hal yang tak kalah penting adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi kerakyatan, serta harus tegas dan berani dalam membela hak-hak rakyat. Hal ini akan memastikan bahwa kepada negara dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat. Dengan menggabungkan ketiga hal ini, seorang kepala negara yang kompeten dan memiliki visi akan mampu memimpin dengan keadilan, mengambil keputusan yang cerdas, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Semua persyaratan ini sangat penting untuk menjalankan tugas

⁸⁴Abdul Hamid, "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi" *Adliya*: 9.1 (2015), h. 92.

kepemimpinan negara dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya.⁸⁵

Kepemimpinan dalam Islam juga harus didasarkan pada integritas dan akhlak yang baik. Seorang pemimpin yang baik harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam akhlak dan moral. Dia harus memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, amanah, dan keterbukaan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dan melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Kemampuan dan kompetensi juga merupakan faktor penting dalam memilih pemimpin dalam Islam. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk memimpin dengan baik. Dia harus mampu mengambil keputusan yang tepat, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memecahkan masalah yang kompleks. Pemimpin yang berkualitas juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, dalam Islam seorang pemimpin juga harus memperhatikan kesejahteraan umat dan kepentingan umum. Pemimpin yang baik bekerja untuk kebaikan umat, mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dia harus mampu merumuskan kebijakan dan program yang mempromosikan keadilan sosial, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum. Secara keseluruhan, kriteria memilih pemimpin dalam Islam mencakup keadilan, integritas, kompetensi, perhatian terhadap kesejahteraan umat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam memilih pemimpin, diharapkan masyarakat dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, adil, dan

⁸⁵Abdul Hamid, "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi" *Adliya*: 9.1 (2015), h. 92.

mampu memimpin dengan baik, untuk kepentingan umat dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Menetapkan kriteria seorang pemimpin bukanlah hal yang sederhana. Dalam pandangan yang tergambar dari ajaran Nabi Muhammad, seorang pemimpin seharusnya bukan hanya sekadar penguasa, tetapi juga seorang pekerja yang melayani kepentingan dan kemaslahatan umat. Al-Qur'an juga menggambarkan bahwa seorang pemimpin haruslah seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Qasas/28: 26:

قَالَتْ احْدِيهٖمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁸⁶

D. Pembagian Kekuasaan

Transformasi kepemimpinan kolektif dari *Arung Patappuloe* menjadi kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo*. Meskipun *Arung La Bongo* telah diangkat menjadi pemimpin, kekuasaan tetap berada di tangan para *Arung Patappuloe* secara bersama-sama. *La Bongo* hanya menjadi pemimpin para *Arung Patappuloe*. Namun, dengan penunjukan *ArungLa Bongo* sebagai raja, kekuasaan utama kini terpusat pada dirinya. Dalam sistem kepemimpinan seperti ini, *Arung La Bongo* memegang peranan sentral dalam pengambilan keputusan serta kebijakan dalam kerajaan. Meskipun demikian, *Arung La Bongo* tidak memiliki kekuasaan mutlak, karena keputusan penting harus melibatkan para *Arung Patappuloe* secara bersama-sama. Kekuasaan kolektif ini masih tetap ada,

⁸⁶Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006).

dan *Arung La Bongo* bertindak sebagai perpanjangan dari *Arung Patappuloe*, mewakili mereka dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan yang telah disepakati.

Model kepemimpinan semacam ini dapat membawa beberapa manfaat dan tantangan. Di satu sisi, kehadiran seorang pemimpin tunggal dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan memungkinkan eksekusi yang lebih cepat. Pemimpin tunggal juga dapat memberikan kesatuan dan stabilitas di Kerajaan. Di sisi lain, pembagian kekuasaan yang tetap dengan para *Arung Patappuloe* juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin tunggal, karena mereka tetap memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan. Dalam konteks sejarah dan budaya, transformasi seperti ini mungkin terjadi sebagai respon terhadap konflik internal atau kebutuhan untuk lebih efisien dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat mencerminkan perkembangan politik dan sosial di Kerajaan Nepo, dan berdampak besar pada dinamika kekuasaan Kerajaan dan masyarakat di wilayahnya.

Sebelum pemisahan kekuasaan diperkenalkan dalam sistem pemerintahan negara, sebagian besar kekuasaan dalam negara dipegang raja. Model pemerintahan semacam itu dikenal dalam negara dipegang oleh raja. Model pemerintahan semacam itu dikenal sebagai monarki absolut dan telah diterapkan di seluruh Eropa. Namun, perang yang berkepanjangan dan masalah keuangan yang dihadapi pemerintah Parancis pada tahun 1789 memaksa mereka untuk memanggil kembali States-General, sebuah badan legislasi yang terakhir kali bersidang pada tahun 1614. Peristiwa ini menjadi awal terbentuknya pemisahan kekuasaan dalam negara. Pemisahan kekuasaan dilakukan dilakukan karena

adanya kesadaran akan pentingnya pembagian kekuasaan untuk menjaga kebebasan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan pemerintah, kebebasan tidak dapat terwujud.⁸⁷

Salah satu pemikiran yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah John Locke dalam bukunya yang berjudul “*The Legislative, Executive, and Federative Powe of The Commonwealth,*”. Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislative, eksekutif, dan federative. Menurut Locke, kekuasaan legislatif harus dipilih dan disetujui oleh rakyat, memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan legislatif tidak harus berada dalam lembaga permanen, kerana tugasnya tidak bersifat rutin. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika kekuasaan tersebut dipegang oleh satu individu dalam jangka waktu yang lama, maka ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan federative, tujuan utamanya adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak. Pemisahan ini memberikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, sehingga melindungi kebebasan dan hak asasi individu serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.⁸⁸

⁸⁷Isharyanto, *Ilmu Negara* (Cet. I; Oase Pustaka, Karanganer: 2016), h. 119.

⁸⁸Isharyanto, *Ilmu Negara* (Cet. I; Oase Pustaka, Karanganer: 2016), h. 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suksesi kepemimpinan dalam kerajaan-kerajaan dapat berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan dan tradisi masing-masing kerajaan. Dalam beberapa kerajaan, suksesi kepemimpinan dapat berlangsung secara heredit, di mana tahta diwariskan dari raja atau ratu yang memerintah kepada anggota keluarganya yang dipilih atau ditunjuk. Beberapa kerajaan menggunakan sistem pemilihan atau konsensus di antara elit pemerintahan, keluarga kerajaan, atau tokoh-tokoh penting masyarakat. Selain itu, terdapat pula kerajaan-kerajaan yang mengalami perubahan kepemimpinan akibat invasi atau penaklukan kerajaan lain. Suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada masa pemerintahan Raja La Bongo yaitu peralihan kepemimpinan dari *Arung Patappuloe* (Raja Empat Puluh) dengan kepemimpinan kolektif menjadi kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh *Arung La Bongo* yang bukan merupakan putra asli dari wilayah Kerajaan Nepo namun merupakan putra dari Datu Suppa' yang belum memiliki jabatan untuk menjadi raja di Nepo. La Bongo ditunjuk sebagai raja, meskipun ia tidak memiliki kekayaan atau pengetahuan dan pengalaman dalam memerintah, para *Arung Patappuloe* bersedia menerima konsekuensi tersebut dan berkomitmen untuk membuatnya pintar dan ber harta. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kerajaan Nepo tidak hanya berdasarkan status atau harta, tetapi juga didasarkan pada pengakuan dan persetujuan raja-raja pada waktu itu. Hal ini juga menunjukkan pergeseran dari sistem suksesi kepemimpinan berdasarkan keturunan ke sistem suksesi berdasarkan kesepakatan dan pemilihan.

2. Dampak suksesi kepemimpinan dalam Kerajaan Nepo yang mengalami transformasi dari kepemimpinan kolektif dari *Arung Patappuloe* menjadi kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh Raja La Bongo memberikan hubungan simbiosis mutualisme antara Kerajaan Suppa' dengan Kerajaan Nepo, dimana dua belah pihak sama-sama saling menguntungkan. Pihak Kerajaan Suppa' mendapatkan keuntungan memperluas wilayah kekuasaan sehingga Kerajaan Nepo merupakan Palili Passajinge (kerajaan bagian yang didasarkan oleh hubungan kekeluargaan), Kerajaan Nepo berkewajiban memberikan upeti sebesar 4 real (Lontara Manuba). Sedangkan keuntungan bagi Kerajaan Nepo adalah mendapatkan perlindungan oleh Kerajaan Suppa', dimana pada masa itu Kerajaan Suppa' merupakan kerajaan terbesar di pesisir barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Suppa' juga pada masa itu sudah punya kontak dagang dengan pihak-pihak luar, sehingga mempermudah bagi Kerajaan Nepo untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian mereka. Selain keuntungan ekonomi yang diperoleh, Kerajaan Nepo juga terhindar dari perang saudara di antara mereka empat puluh raja (Arung Pattapulo).⁸⁹ Selain itu, suksesi kepemimpinan yang terjadi memungkinkan pengaturan pemerintah yang lebih efektif dan menciptakan stabilitas di dalam kerajaan Nepo di bawah pemerintahan La Bongo.
3. Analisis suksesi kepemimpinan Kerajaan Nepo pada Masa Pemerintahan Raja La Bongo dalam perspektif Islam. Suksesi kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan pentingnya pemilihan pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan partisipasi aktif masyarakat. Proses pemilihan ini memastikan pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria kepemimpinan yang

⁸⁹ Makmur, "Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi". *JURNAL WALENNAE*, 15.2 (2017), hal. 120.

baik dan berkualitas yang diharapkan untuk melayani umat secara adil dan merata. Sementara proses suksesi Kerajaan Nepo menunjukkan adanya partisipasi dalam memilih pemimpin, namun dengan cara dan substansi yang berbeda dari prinsip-prinsip suksesi dalam Islam.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah, agar penelitian ini menjadi rekomendasi untuk terus menggali situs-situs sejarah yang ada di daerah. Kemudian, pelestarian dan perlindungan situs-situs sejarah di daerah bisa tetap dilakukan sehingga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain itu, kearifan lokal atas berbagai peristiwa sejarah bisa dimasukkan kedalam pembelajaran sejarah di sekolah.
2. Masyarakat, turut serta membantu dan menjaga berbagai upaya pelestarian situs-situs sejarah di daerahnya.
3. Peneliti selanjutnya, penelitian ini semoga menjadi acuan untuk mengangkat kembali berbagai peristiwa sejarah yang ada di daerah dalam sebuah penelitian. Sehingga khasanah pengetahuan sejarah di daerah bisa lebih membumi dan dikenal luas oleh seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- A. Nurkidan, Hasnani, Hamsiah, et al., eds., *Jejak Arkeologi Islam Luwu* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan* (Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020).
- Artha, Arwan Tuti. *Kudeta Mei '98 Persesteraan Habibie-Prabowo*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Asba, A.Rasyid. *Kerajaan Nepo, Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.
- Calvert, Peter. *Proses Sukses Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dulu, Akil. et al., eds., *Monumen Islam di Sulawesi Selatan*. Cet. I; Makassar: Balai Cagar Budaya Makassar, 2013.
- Hamid, Abd. Rahman dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Isharyanto, *Ilmu Negara* (Cet. I; Karanganyar: Oase Pustaka, 2016)
- Hasanudin, *Sejarah Sosial Politik Kerajaan Banggai (1907-1942)*. Yogyakarta: Kepel Pres, 2015.
- Heckman, Huneryager. *Kepemimpinan*. Semarang: Dahara Prize, 1992..
- Ismail, *Sejarah Agama-Agama (Pengantar Studi Agama-Agama)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. UIN: Maliki Press, 2010.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maman, U. *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta; Academia, 2010.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cet. IV; PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- Rabi'ah, Rumidan. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rasyid, Darwas. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK. II Kabupaten Barru*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1990.
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia seri Geografi "Eropa"*. Cet. I.; Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Saebeni, Ahmad. *et al., eds., Kepemimpinan*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Soehono, *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Penerbit Liberty, 2005.
- Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Supardan & Dadang H, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendidikan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, Rajawali: 1984.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

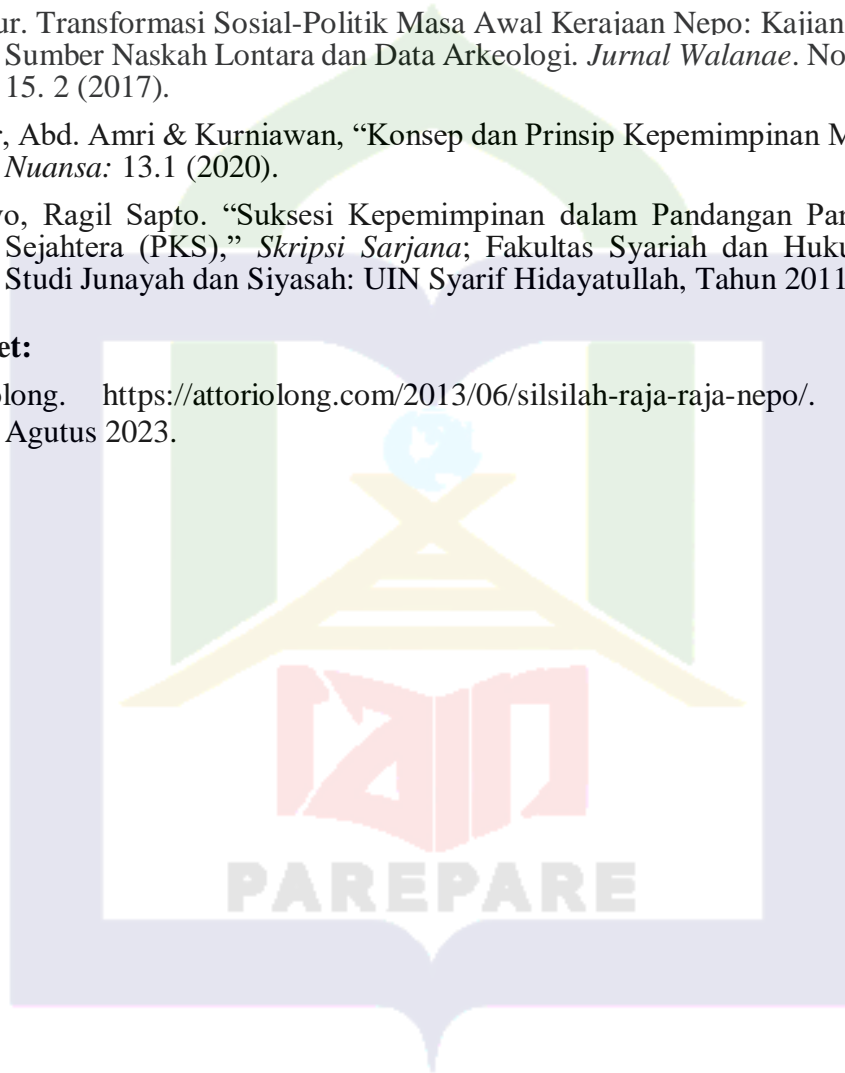
Jurnal dan Skripsi:

- Hamid, Abdul. "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi" *'Adliya*: 9.1 (2015).
- Lafifah, Wiwik Sayyidatul "Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar (11-13 H/632-634 M) dan Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) 'Suksesi, Kebijakan dan Tipe Kepemimpinan.'" *Skripsi Sarjana*; Fakultas Adab dan Humaniora: Universitas Islam Negeri Sunan Apel Surabaya, Tahun 2020.

- Linggo, Linggo. “Proses Perencanaan Suksesi Pada Perusahaan Peralatan Makan” *AGORA: Jurnal Program Manajemen Bisnis Universitas Kristen Petra* 4.1 (2016).
- Ningsih, Ratih Afriana “*Penetapan Dipensasi Nikah Pengadilan Agama Barru dalam Pandangan Hukum Islam dan Medis,*” *Skripsi Sarjana*; Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018.
- Makmur. Transformasi Sosial-Politik Masa Awal Kerajaan Nepo: Kajian Berdasarkan Sumber Naskah Lontara dan Data Arkeologi. *Jurnal Walanae*. November 2017 15. 2 (2017).
- Siregar, Abd. Amri & Kurniawan, “Konsep dan Prinsip Kepemimpinan Multi Agama” *Nuansa*: 13.1 (2020).
- Wibowo, Ragil Sapto. “Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” *Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Junayah dan Siyasah: UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2011.

Internet:

- Attoriolong. <https://attoriolong.com/2013/06/silsilah-raja-raja-nepo/>. Diakses: 8 Agustus 2023.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Rekomendasi Penelitian



Lampiran II Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Barru



Lampiran IV Dokumentasi

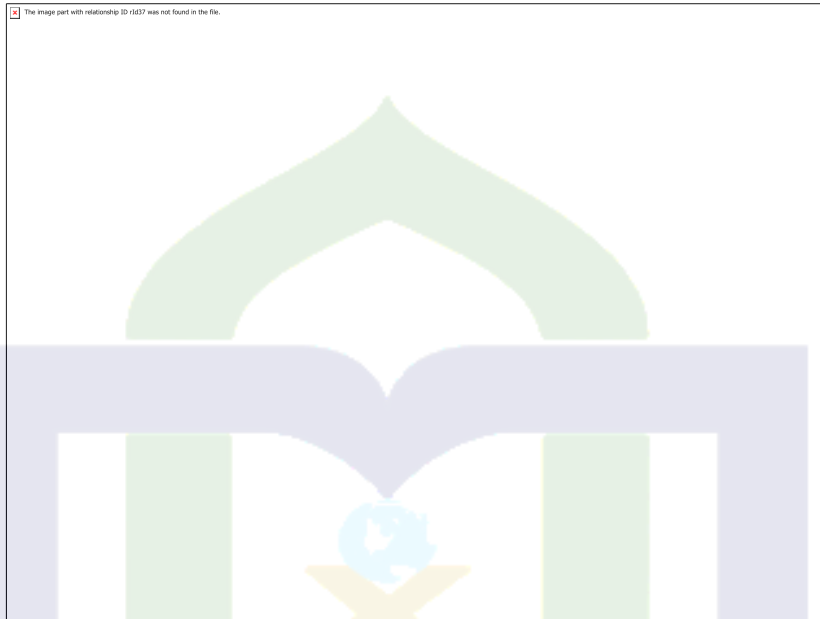
Foto tentang Kerajaan Nepo



Gambar 1.1 Peta Kuno Nepo dan Batu Pute
Sumber: Attoriolong.com



Gambar 1.2 Foto La Colo Arung Nepo/Arung Mallusetasi, Raja
Nepo/Mallusetasi yang terakhir
Sumber: Attoriolong.com



Gambar 1.3 Makam Raja Kerajaan Nepo
Sumber: <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sulawesi/nepo-kerajaan/1-nepo/>



Gambar 1.4 Kompleks Makam Raja La Bongo
Sumber: Dokumentasi, Sabtu 12 Agustus 2023



Gambar 1.5 Kompleks Makam Arung Nepo
Sumber: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/histori_desa_nepo



Lampiran V Biografi Penulis

BIOGRAFI PENULIS



Andi Ashari (16.1400.043) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Agus Salim dan Ibunda Andi Rosmila sebagai anak 1 dari 4 bersaudara. Penulis dilahirkan di Mallawa, pada tanggal 27 Oktober 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 3 Parepare (lulus tahun 2010), melanjutkan ke SMP 1 Mallusetasi (lulus tahun 2013), kemudian di melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah

Negeri Baru (lulus tahun 2016). Hingga akhirnya saya menempuh kuliah pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan motto “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengetahuan sejarah dan kearifan lokal serta kebudayaan masyarakat lokal di Kabupaten Barru pada Tahun 1600 M khususnya sejarah Kerajaan Nepo pada Masa Raja La Bongo dan proses suksesi kepemimpinan pada masa itu. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Kepemimpinan Kerajaan Nepo Pada Abad XVI M di Mallusetasi Kabupaten Barru**”.